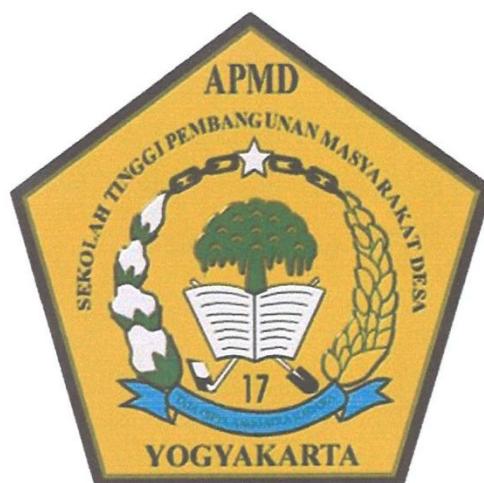


SKRIPSI

RELASI PEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARI DENGAN KELOMPOK SADAR WISATA DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA

(Studi Pada Objek Wisata Goa Selarong di Kalurahan Guwosari, Kapanewon
Pajangan, Kabupaten Bantul)



OLEH
LUKAS NACK
20520149

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S-1)

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2025



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 5 Maret 2025
Waktu : Pukul 10:00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A.

Ketua Penguji/Pembimbing



Dr. Rijel Samaloisa

Penguji Samping I



Dr. Raden Yoseph Gembong Rahmadi, SH. M.Hum.

Penguji Samping II



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Lukas Nack

Nim : 20520149

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Relasi Pemerintah Kalurahan Guwosari Dengan Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata (Studi Pada Objek Wisata Goa Selarong di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul)” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Maret 2025



Lukas Nack

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Lukas Nack
NIM : 20520149
Telp : 082198125335
Email : lukaasss0@gmail.com

Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan ini memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“RELASI PEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARI DENGAN
KELOMPOK SADAR WISATA DALAM PENGELOLAAN OBJEK
WISATA (Studi Pada Objek Wisata Goa Selarong di Kalurahan Guwosari,
Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul)”**

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 5 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



Lukas Nack
20520149

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Karena atas berkat dan Rahmat-nya yang melimpah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semoga bermanfaat bagi banyak orang. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasi penulis karean berkat doa dan dukungan mereka penulus dapat menyelesaikan skripsi ini:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu melindungi, menyertai dan memberikan nafas kehidupan sampai dengan saat ini.
2. Teristimewa Kepada pahlawan, cinta pertama penulis, referensi hidup terbaik selama penulis hidup hingga saat ini yakni, **Bapak Mesak Nack** dan **Ibu Telda Rumbewas** yang senantiasa memberikan semangat, pelukan, doa dan kasih sayang kepada penulis. Keduanya merupakan merupakan sosok orang tua yang berhasil membuat penulis bangkit dari kata menyerah. Penulis sadar, bahwa setiap kata dalam Skripsi ini adalah buah dari kerja keras yang disertai doa dari kedua orang tuaku. Skripsi ini adalah persembahan dari anak kalian yang saat ini sudah mulai tumbuh dewasa. Terimakasih atas nasehat dan kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah kaki penulis. Skripsi ini mungkin belum sebanding dengan apa yang sudah bapak ibu berikan buat penulis.
3. Kepada Nene Welmince Rumaseb, Kaka Yosua Nack, kaka Ipar Yanti Serpara, Ade Yuni Nack, Ade Nofarlin Nack, Ade Dolina Nack, Ade Salomo Nack, Ade Ferton Nack, Ade Fila Nack, kaka Adolof Waropen, kaka Dominggus Waropen, Kaka Neti Waropen, Kaka Cornelius Rumaseb, Kaka Adam Nack, Kaka Marlon Nack, Bapa ade Ariel Nack, Bapa ade Naftali

Nack, Almarhum Santo Nack, Tanta Beatriks Nack, Bapa tua SopaterNack,
Tanta Lorse Nack, Tanta Ferida Nack, Bapa tua Lukas Waropen, Mama tua
Maryana Imbir, Tete Ayub Watem, Bapa tua Nelwan Rumasep, Bapa ade
Nimbrord Nack, Bapa ade Baldus Dimara, Mama ade Palamina Rumbewas
dan Nene Sarce Fakdawer.

MOTTO

“Pertolonganku Ialah Dari Tuhan Yang Menciptakan Langit dan Bumi”

(Mazmur 121:2)

“TUHAN Akan Menjaga Keluar Masukmu, Dari Sekarang Sammapai Selama-lamanya”

(Mazmur 121: 8)

“Kenem Faro Farkarkor (Hidup Untuk Pendidikan) dan Farkarkor Faro Kenem (Pendidikan Untuk Hidup)”

(Markus Wanma)

“Komitmen Adalah Tidak Bukan Sekedar Kata”

(Lukas Nack)

"Tetaplah berusaha, karena setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada tujuan besar"

(Sultan Alor)

“Skripsi ini bukan Akhir dari Tongkrongan kita tetapi sebagai Awal yang baik untuk Kekeluargaan Kita”

(Squad Tongkrongan Subuh)

“Kerjakan Bagian Kita Selebihnya Serahkan Kepada TUHAN

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunianya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Pemerintah Kalurahan Dalam Penerapan Pelayanan Berbasis *E-Government* Terhadap Masyarakat” (Studi di Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu, di kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan kepada penulis, khususnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta sekaligus dosen pembimbing yang sudah berbesar hati menerima saya sebagai anak bimbingan, serta senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian Skripsi sebagai tugas akhir.
4. Bapak Dr. Rijel Samaloisa. selaku Dosen penguji satu saya, yang sudah membantu dan membimbing penulis serta sumbangannya pemikiran, pengetahuan dan gagasannya.

5. Bapak Dr. Raden Yoseph Gembong Rahmadi, SH. M. Hum. selaku Dosen penguji Dua saya, yang sudah meluangkan waktunya membantu dan membimbing penulis serta menyumbangkan pemikiran, pengetahuan dan gagasan-gagasananya.
6. Bapak/Ibu Dosen, yang sudah bersedia meluangkan waktu melayani, memberikan ilmunya dan mendidik selama penulis menimbah ilmu di kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa”APMD”Yogyakarta
7. Pemerintah Kalurahan Guwosari yang telah bersedia dan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini. Dan kepada para masyarakat Kalurahan Guwosari yang telah bersedia untuk menjadi narasumber penulis ucapan limpah terima kasih.
8. Kepada Keluarga Besar IPMARAM, yang merupakan Rumah, Wadah bagi penulis Ketika penulis menjalani Studi di Kota Yogyakarta.
9. Kepada abang Adrianus Oulaana (sri sultan alor) yang mana telah membantu dan memberikan nasehat sebagai abang bagi saya terimakasih
10. Andris Dimara, Ortisan Dimara, Trance Dimara, Miles Dimara, Neisel Mambraku, Yakub Waropen, Brian Rumbewas, Natan Rumbewas, Irmanso Morin, Viktor Watem, Lukas Watem, Wellem Rumaseb, Silas. Imbeyoper
11. Kepad “Squad Tongkrongan Malam Pantang Pulang Sebelum Pagi” (Abang Sultan, Kaka Elton, Abang Boming, Abang UT, Abang Anugerah U.R dan Silas Cllaudio) Trimaksi dan Tetap semangat. Skripsi ini bukan Akhir dari Tongkrongan kita tetapi sebagai Awal yang baik untuk Kekeluargaan Kita.

Satu Kata “Panjang Umur dan Tumbuh Subur Squad Tongkrongan Pantang
Pulang Sebelum Pagi”

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
INTISARI.....	xv
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	19
C. Rumusan Masalah	21
D. Tujuan Penelitian.....	21
E. Manfaat Penelitian	22
F. Literatur Review.....	23
G. Kerangka Konseptual	27
1. Relasi Hegemoni	28
2. Relasi Egaliter	35
3. Relasi Konfliktual	53

4. Relasi Konstruktif	58
H. Metode Penelitian.....	64
1. Jenis Penelitian.....	64
2. Unit Analisis Data	65
3. Teknik Pengumpulan Data	71
4. Teknik Analisis Data	77
BAB II OBYEK WISATA GOWA SELARONG	85
A. Sejarah Gowa Selarong	85
B. Kelompok Sadar Wisata Dewi Sari.....	89
BAB III RELASI PEMERINTAH KALURAHAN GUOSARI DENGAN KELOMPOK SADAR WISATA DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA	98
A. Relasi Hegemonik	98
B. Relasi Egliter.....	107
C. Relasi Konfliktual	115
D. Relasi Konstruktif	119
BAB IV PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran.....	128
PEDOMAN WAWANCARA	129
LAMPIRAN.....	132
DAFTAR PUSTAKA	138

DAFTAR TABEL

Table 1. Tabel Informan Penelitian	68
------------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Gambar Goa Selarong Kakung.	87
Gambar 2. 2. Gambar Goa Selarong Putri.	88
Gambar 2. 3. Gambar Struktur Kepengerus Pokdarwis Dewi Sari.....	95

INTISARI

Penelitian ini bertujuan menganalisis model relasi antara pemerintah Kalurahan Guwosari dan Kelompok Sadar Wisata Dewi Sari dalam pengelolaan Objek Wisata Goa Selarong, dengan mengkaji apakah relasi tersebut bersifat Hegemoni, Egaliter, Konfliktual, atau Konstruktif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. subjek dalam penelitian ini terdiri dari Pemerintah Kalurahan Guwosari, Bamuskal Kalurahan Guwosari dan Kelompok Sadar Wisata Dewi Sari Kalurahan Guwosari. Subjek dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan pengelolaan objek wisata Goa Selarong dari pemerintah desa ke Dinas Pariwisata di Kalurahan Guwosari tidak sepenuhnya mengubah pola relasi kekuasaan yang ada. Secara formal memang terjadi pergeseran otoritas, namun secara substantif relasi yang terbentuk tetap bersifat hegemonik, dengan Dinas Pariwisata sebagai aktor dominan dalam pengambilan keputusan, pengaturan kebijakan, dan distribusi sumber daya. Minimnya pelibatan pemerintah desa, Pokdarwis, dan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pembagian manfaat ekonomi menunjukkan bahwa mereka hanya diposisikan sebagai pelaksana teknis, bukan sebagai mitra sejajar. Dengan demikian, meskipun tampak sebagai bentuk profesionalisasi pengelolaan, namun pola relasi yang terjadi belum mencerminkan prinsip partisipatif dan kolaboratif, serta masih memperlihatkan kuatnya dominasi birokrasi tingkat kabupaten.

Sebagai upaya perbaikan tata kelola pengelolaan wisata Goa Selarong, disarankan agar Dinas Pariwisata mendorong pelibatan aktif aktor local termasuk pemerintah kalurahan, Pokdarwis, dan Masyarakat dalam seluruh tahapan pengambilan keputusan secara setara dan partisipatif. Selain itu, perlu dibangun mekanisme koordinasi yang berkelanjutan melalui forum komunikasi rutin antar pemangku kepentingan guna memperkuat kolaborasi dan menghindari dominasi sepihak. Di sisi lain, reformulasi sistem distribusi manfaat ekonomi juga perlu dilakukan agar lebih adil dan proporsional, sesuai kontribusi masing-masing pihak, sehingga dapat meningkatkan rasa memiliki dan mendukung keberlanjutan pengelolaan wisata berbasis komunitas.

Kata Kunci: Pemerintah Kalurahan, Kelompok Sadar Wisata, Relasi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the relational model between the Guwosari Village Government and the Dewi Sari Tourism Awareness Group (Pokdarwis) in the management of the Goa Selarong tourism site, by examining whether the relationship is hegemonic, egalitarian, conflictual, or constructive in nature. The research employs a descriptive qualitative method. The subjects of this study include the Guwosari Village Government, the Village Consultative Body (Bamuskal) of Guwosari, and the Dewi Sari Tourism Awareness Group.

These subjects were selected using purposive sampling techniques. The findings indicate that the transfer of tourism management authority from the village government to the Tourism Office in Guwosari did not significantly alter existing power relations. While there was a formal shift in authority, substantively the relationship remained hegemonic, with the Tourism Office acting as the dominant actor in decision-making, policy regulation, and resource distribution.

The limited involvement of the village government, Pokdarwis, and the local community in strategic planning and benefit-sharing processes reflects their positioning as mere technical implementers rather than equal partners. Thus, although the shift appears to be a form of management professionalization, the relational model still fails to reflect participatory and collaborative principles, and instead reveals the entrenched dominance of the district-level bureaucracy. As a recommendation for improving governance at the Goa Selarong tourism site, it is suggested that the Tourism Office actively promote inclusive participation of local actors including the village government, Pokdarwis, and the local community across all stages of decision-making in an equitable and participatory manner.

Furthermore, a sustainable coordination mechanism should be established through regular forums among stakeholders to strengthen collaboration and prevent unilateral domination. Additionally, the distribution system for tourism-generated economic benefits should be restructured to ensure greater fairness and proportionality, aligned with each party's contribution, in order to foster a sense of ownership and support the sustainability of community-based tourism management.

Keywords: Village Government, Tourism Awareness Group, Power Relations.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Relasi antara pemerintah desa dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengelolaan objek wisata desa mencerminkan suatu dinamika yang tidak sederhana. Hubungan ini terbangun dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang saling berkaitan, sehingga menghasilkan interaksi yang bersifat multidimensi dan terus berubah. Pemerintah desa, sebagai aktor formal dengan kewenangan administratif, dan Pokdarwis, sebagai representasi masyarakat sipil yang memiliki kedekatan dengan realitas lokal, berada dalam suatu hubungan yang tidak selalu linier. Interaksi antara keduanya menciptakan pola-pola relasional yang dapat mencerminkan dominasi, kesetaraan, koordinasi, maupun negosiasi kepentingan.

Dalam kerangka ini, relasi tersebut dapat ditelaah melalui empat perspektif utama hegemoni, egalitarian, konseptual, dan konstruktif yang masing-masing menawarkan sudut pandang berbeda dalam memahami praktik pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat (Wardana et al., 2019). Perspektif hegemoni menunjukkan bahwa pemerintah desa sering kali berada dalam posisi dominan, mengarahkan jalannya pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis tanpa keterlibatan aktif dari Pokdarwis. Dalam situasi seperti ini, Pokdarwis cenderung menjadi pelaksana teknis semata, bukan mitra strategis dalam pembangunan pariwisata.

Sebaliknya, perspektif egalitarian menekankan pentingnya kesetaraan dalam pembagian peran dan tanggung jawab. Dalam hubungan yang egaliter,

baik pemerintah desa maupun Pokdarwis sama-sama memiliki suara dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan wisata. Kolaborasi semacam ini memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan objek, dan memungkinkan terjadinya pemberdayaan yang sesungguhnya.

Sementara itu, pendekatan konseptual mengajak kita untuk melihat relasi ini sebagai bagian dari kerangka kebijakan yang lebih luas. Di sini, relasi antara pemerintah desa dan Pokdarwis dipahami sebagai mekanisme untuk mewujudkan tujuan pembangunan pariwisata yang terencana, berbasis data, dan berorientasi jangka panjang. Melalui pendekatan ini, sinergi antara keduanya diposisikan sebagai bagian dari proses perumusan kebijakan publik yang melibatkan analisis kontekstual, identifikasi potensi lokal, dan pengintegrasian nilai-nilai keberlanjutan.

Adapun perspektif konstruktif menekankan bahwa hubungan antara pemerintah desa dan Pokdarwis merupakan hasil dari proses interaksi yang dinamis dan negosiasi berkelanjutan. Dalam relasi ini, perbedaan pandangan, kepentingan, dan sumber daya bukan dilihat sebagai hambatan, melainkan sebagai potensi untuk menciptakan solusi bersama. Pemerintah desa dan Pokdarwis saling memengaruhi, saling belajar, dan beradaptasi untuk menciptakan model pengelolaan pariwisata yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan lokal.

Dengan memahami kompleksitas relasi ini dari berbagai perspektif, kita dapat melihat bahwa keberhasilan pengelolaan pariwisata desa tidak hanya bergantung pada kapasitas teknis, tetapi juga pada kualitas relasi sosial

dan politik yang terbangun antara aktor-aktor kunci di tingkat lokal. Oleh karena itu, menciptakan ruang dialog yang inklusif dan mekanisme partisipatif yang adil menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola pariwisata yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis komunitas.

Hegemoni pemerintah desa terhadap Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengelolaan objek wisata mencerminkan adanya relasi kekuasaan yang tidak setara, di mana otoritas lokal memegang kendali utama dalam menentukan arah dan kebijakan pengelolaan pariwisata desa (Sutawa, 2012). Posisi dominan pemerintah desa berakar dari kewenangan struktural yang mereka miliki atas wilayah administratif dan pengelolaan sumber daya lokal. Dalam konteks ini, pemerintah desa berfungsi sebagai pengambil keputusan utama dalam hal perencanaan, penganggaran, serta regulasi yang berkaitan dengan sektor pariwisata desa.

Sementara itu, Pokdarwis, yang secara ideal dibentuk sebagai perwakilan masyarakat lokal untuk mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan pariwisata, sering kali hanya difungsikan sebagai pelaksana teknis dari kebijakan yang telah dirumuskan secara sepihak oleh pemerintah desa. Padahal, secara konseptual, Pokdarwis dibentuk untuk mengelola, mempromosikan, dan mengembangkan potensi wisata desa secara partisipatif serta menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan agenda pembangunan desa (Ardika & Darma Putra, 2015). Namun dalam praktik hegemonik, fungsi ini cenderung tersisih oleh kuatnya kontrol pemerintah desa terhadap seluruh aspek operasional pariwisata.

Dominasi tersebut tampak jelas dalam cara pemerintah desa menetapkan regulasi, menyusun arah kebijakan, dan bahkan dalam proses pemilihan anggota atau kepengurusan Pokdarwis itu sendiri. Dalam banyak kasus, Pokdarwis kehilangan otonomi dan hanya menjalankan arahan dari pemerintah desa, tanpa ruang yang memadai untuk menyampaikan aspirasi atau menginisiasi program berdasarkan inisiatif lokal. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kekuasaan yang terbangun tidak sepenuhnya bersifat kolaboratif, melainkan lebih bersifat top-down, dengan kecenderungan sentralisasi keputusan di tangan pemerintah desa (Wardana et al., 2019).

Kondisi ini diperkuat oleh posisi strategis pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa dan menyusun program pembangunan, termasuk yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Pemerintah desa memiliki kewenangan mutlak dalam menentukan prioritas anggaran dan arah pembangunan, termasuk menentukan skala prioritas kegiatan Pokdarwis. Dalam struktur seperti ini, Pokdarwis tidak memiliki kapasitas yang cukup kuat untuk menegosiasikan kepentingan komunitas secara independen. Peran Pokdarwis yang seharusnya sebagai agen pemberdayaan masyarakat pun tereduksi menjadi perpanjangan tangan birokrasi desa.

Selain menimbulkan ketimpangan peran, relasi hegemonik ini juga berisiko menghambat terciptanya inovasi dan keberlanjutan dalam pengelolaan pariwisata desa. Ketika inisiatif masyarakat dibatasi dan peran Pokdarwis dimarginalkan, maka potensi lokal yang bersumber dari kearifan dan pengalaman masyarakat tidak dapat diakomodasi secara optimal. Padahal, keberhasilan pariwisata berbasis masyarakat sangat bergantung pada

kemampuan komunitas untuk terlibat aktif dan merasa memiliki terhadap proses pengelolaan destinasi wisata. Jika pola relasi hegemonik ini terus dipertahankan, maka bukan tidak mungkin akan muncul resistensi dari masyarakat, atau bahkan kegagalan dalam menciptakan sistem pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif (Cahyadi & Wibowo, 2021).

Dengan demikian, perlu ada evaluasi kritis terhadap relasi antara pemerintah desa dan Pokdarwis, khususnya dalam konteks distribusi kekuasaan dan ruang partisipasi. Mendorong transformasi dari relasi hegemonik menuju hubungan yang lebih dialogis dan partisipatif merupakan langkah strategis dalam membangun tata kelola pariwisata desa yang adil dan berkelanjutan.

Selain itu, relasi egalitarian antara pemerintah desa dan kelompok sadar wisata mencerminkan hubungan yang setara dan saling menghargai, di mana pengelolaan dan pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama (Hampton, 2003). Dalam relasi ini, kedua pihak berkolaborasi dengan prinsip kesetaraan, saling mendukung, dan berbagi tanggung jawab dalam pengelolaan objek wisata (Tosun, 2000). Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan pengarah, memberikan dukungan kebijakan, serta memastikan bahwa objek wisata yang dikelola bermanfaat bagi masyarakat dan berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan (Blackstock, 2005).

Sementara itu, Pokdarwis sebagai representasi dari masyarakat lokal, memiliki peran vital dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik lapangan. Anggota Pokdarwis biasanya merupakan individu yang memahami secara mendalam karakteristik sosial budaya desa, potensi wisata yang

dimiliki, serta dinamika kebutuhan masyarakat setempat (Okazaki, 2008). Pengetahuan lokal yang mereka miliki menjadi aset penting dalam merancang produk wisata yang autentik, menarik, dan relevan dengan nilai-nilai lokal. Dalam relasi egalitarian, pengetahuan tersebut tidak diabaikan, melainkan menjadi bahan pertimbangan utama dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Relasi semacam ini juga mendorong terbentuknya *good governance* di tingkat lokal, di mana prinsip akuntabilitas, transparansi, dan inklusivitas diterapkan secara konsisten. Pemerintah desa tidak hanya memerintah dari atas, tetapi juga bersikap terbuka terhadap masukan, kritik, serta usulan yang datang dari Pokdarwis. Dalam praktiknya, ini bisa diwujudkan melalui pelibatan aktif Pokdarwis dalam perencanaan destinasi wisata, pengembangan program pelatihan berbasis kebutuhan lokal, dan penyusunan paket wisata yang mempertimbangkan nilai budaya, lingkungan, dan ekonomi desa (Timothy, 1999). Pelibatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan bentuk nyata pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan.

Lebih jauh, relasi egalitarian ini memberikan ruang bagi terwujudnya pembangunan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan. Ketika pemerintah desa dan Pokdarwis bekerja sama secara setara, maka hasil yang dicapai cenderung lebih inklusif, karena kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, relasi ini menjadi fondasi penting

dalam menciptakan pariwisata yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan

Relasi egalitarian antara pemerintah desa dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) tidak hanya menekankan kesetaraan dalam struktur kerja sama, tetapi juga mengedepankan prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai inti dari tata kelola pariwisata berbasis komunitas. Dalam kerangka ini, Pokdarwis tidak lagi diposisikan sebagai pelaksana kebijakan semata, melainkan sebagai agen perubahan yang aktif dalam merancang, mengambil keputusan, dan mengimplementasikan program-program pariwisata desa (Scheyvens, 2002). Melalui pelibatan yang setara ini, kapasitas masyarakat lokal untuk mengelola aset wisata secara mandiri terus ditumbuhkan, sehingga pariwisata tidak hanya menjadi proyek pembangunan, tetapi juga alat transformasi sosial.

Pemerintah desa, dalam relasi yang demikian, tidak mengambil alih peran masyarakat, melainkan memberikan ruang dan dukungan yang memungkinkan Pokdarwis untuk berkembang. Dukungan ini dapat berupa penyediaan anggaran desa, fasilitasi pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta bantuan dalam membangun jaringan kerja sama dengan pihak luar seperti akademisi, sektor swasta, atau lembaga pariwisata (Giampiccoli & Kalis, 2012). Selain itu, pemerintah desa juga mendorong terciptanya inovasi dalam berbagai aspek pengelolaan pariwisata, mulai dari promosi berbasis digital, pengembangan produk wisata yang mengangkat nilai-nilai lokal, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kunci dari keberhasilan dalam relasi ini adalah keseimbangan baik dalam hal distribusi pengetahuan, akses terhadap sumber daya, maupun pembagian tanggung jawab. Ketika kedua pihak memiliki akses yang setara terhadap informasi dan dapat saling belajar serta mendukung, maka keputusan yang diambil menjadi lebih kontekstual, partisipatif, dan dapat diterima oleh semua pihak. Pengetahuan lokal yang dimiliki Pokdarwis berpadu dengan kemampuan administratif pemerintah desa, menciptakan sinergi yang memperkuat efektivitas pengelolaan wisata (Zhao & Ritchie, 2007).

Keseimbangan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi teknis dalam pengelolaan destinasi, tetapi juga membawa pengaruh positif terhadap dimensi sosial dan ekologis. Ketika pengelolaan objek wisata dilakukan secara kolaboratif dan berlandaskan nilai kesetaraan, maka hasilnya akan lebih inklusif dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat yang tinggi meningkatkan rasa memiliki terhadap objek wisata, yang pada gilirannya memperkuat upaya pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam peningkatan ekonomi, tetapi juga dalam kohesi sosial dan identitas komunitas (Su et al., 2021).

Lebih dari itu, pendekatan egalitarian ini menciptakan ruang bagi tumbuhnya inovasi sosial dan ekonomi. Masyarakat yang merasa diberdayakan akan terdorong untuk menciptakan inisiatif baru, seperti homestay berbasis budaya, ekowisata, kerajinan tangan khas daerah, hingga kegiatan edukatif yang melibatkan wisatawan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Dengan begitu, desa wisata tidak hanya menjadi destinasi,

tetapi juga ruang belajar dan interaksi lintas budaya yang memperkuat pembangunan berbasis lokal.

Secara keseluruhan, relasi egalitarian ini menjadi fondasi penting dalam membangun model pengelolaan pariwisata yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Ketika pemerintah desa dan Pokdarwis mampu saling menghargai, berbagi peran secara adil, dan menjalin kolaborasi yang setara, maka pariwisata desa tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tetapi juga wahana pemberdayaan yang memperkuat ketahanan sosial dan ekologi masyarakat setempat.

Selain itu, pengelolaan objek wisata tidak hanya dilihat sebagai kegiatan operasional, tetapi juga sebagai upaya konseptual yang melibatkan pemikiran mendalam mengenai bagaimana pariwisata dapat berkontribusi pada pembangunan desa secara keseluruhan (Sharpley, 2020). Perspektif konseptual ini melibatkan perencanaan dan strategi pengelolaan jangka panjang yang bertujuan menciptakan pariwisata yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan melestarikan budaya lokal (Hall, 2019). Pemerintah desa dan kelompok sadar wisata perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan jangka panjang pengelolaan wisata, serta bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang melibatkan analisis situasi, identifikasi potensi wisata, dan riset tentang tren pariwisata (Dredge & Jamal, 2015).

Selain dipahami sebagai aktivitas teknis dan operasional sehari-hari, pengelolaan objek wisata di tingkat desa juga harus dimaknai sebagai sebuah proses konseptual yang berakar pada visi jangka panjang pembangunan desa

secara menyeluruh. Perspektif konseptual menempatkan pariwisata bukan semata-mata sebagai sektor ekonomi, melainkan sebagai instrumen pembangunan yang bersifat multidimensional meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan (Sharpley, 2020). Dengan kata lain, pengelolaan wisata harus didesain sebagai bagian integral dari strategi pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam pendekatan ini, setiap kebijakan dan langkah pengelolaan pariwisata harus didasari oleh perencanaan strategis yang matang dan berbasis data. Hal ini mencakup penyusunan visi bersama antara pemerintah desa dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), identifikasi potensi dan tantangan lokal, serta penetapan tujuan yang realistik namun progresif. Tujuan tersebut tidak hanya sebatas peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, pelestarian nilai-nilai budaya, penguatan identitas lokal, serta konservasi lingkungan hidup (Hall, 2019). Pengelolaan pariwisata yang bersifat konseptual juga menuntut adanya kesinambungan antara perencanaan dan implementasi, serta evaluasi berkelanjutan untuk menyesuaikan kebijakan dengan perubahan dinamika sosial dan pasar wisata.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah desa dan Pokdarwis dalam membangun shared understanding pemahaman Bersama tentang peran strategis pariwisata dalam pembangunan desa. Pemahaman ini penting agar seluruh proses pengelolaan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, dilandasi oleh semangat kolaboratif dan visi bersama. Kedua pihak harus duduk bersama untuk merumuskan kebijakan

yang inklusif, berbasis kebutuhan nyata masyarakat, dan memperhitungkan tren serta dinamika industri pariwisata yang terus berkembang (Dredge & Jamal, 2015).

Dalam praktiknya, proses ini bisa diwujudkan melalui forum musyawarah desa, penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata (masterplan), serta pelibatan ahli atau akademisi dalam melakukan riset potensi wisata desa. Riset ini mencakup analisis situasi, penilaian daya dukung lingkungan, studi kelayakan ekonomi, hingga kajian tentang perilaku wisatawan dan tren wisata berbasis komunitas. Dengan informasi tersebut, pemerintah desa dan Pokdarwis dapat menyusun strategi yang lebih presisi dan adaptif, baik dalam pengembangan produk wisata, penguatan infrastruktur, maupun promosi digital.

Pendekatan konseptual ini juga menekankan pentingnya membangun sistem pengelolaan yang resilien terhadap perubahan, termasuk perubahan iklim, pergeseran tren wisata, dan fluktuasi ekonomi. Oleh karena itu, strategi pengelolaan wisata tidak boleh bersifat jangka pendek atau reaktif, melainkan harus dirancang dengan orientasi jangka panjang yang berkelanjutan dan mampu membawa dampak luas bagi kemajuan desa. Hal ini sejalan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan, yang tidak hanya mengedepankan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial, partisipasi masyarakat, serta kelestarian lingkungan sebagai pilar utama.

Dengan demikian, perspektif konseptual dalam pengelolaan pariwisata desa menawarkan kerangka berpikir yang lebih strategis dan berorientasi masa depan. Jika diimplementasikan secara konsisten,

pendekatan ini akan memperkuat posisi desa tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai entitas pembangunan yang mandiri, berdaya saing, dan mampu menjaga jati diri budaya serta sumber daya alamnya di tengah arus globalisasi pariwisata.

Relasi konstruktif antara pemerintah desa dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menggambarkan suatu bentuk interaksi yang bersifat sinergis dan saling memperkuat, di mana masing-masing pihak tidak hanya menjalankan perannya secara individual, tetapi juga berupaya untuk membangun hubungan kerja sama yang produktif dan adaptif dalam pengelolaan objek wisata desa (Boley & McGehee, 2014). Dalam hubungan yang konstruktif ini, prinsip dasar yang dipegang adalah kemitraan yang sejajar namun bersifat saling melengkapi. Pemerintah desa bertindak sebagai pendukung strategis yang menyediakan kebijakan, sumber daya, dan legalitas operasional, sedangkan Pokdarwis memberikan kontribusi teknis, pengetahuan lokal, serta pemahaman terhadap dinamika sosial dan kultural masyarakat setempat.

Kolaborasi antara kedua aktor ini tidak bersifat statis, melainkan berkembang melalui proses dialog, evaluasi bersama, dan pembelajaran kolektif. Pemerintah desa memberikan landasan hukum dan dukungan kelembagaan seperti alokasi dana desa untuk pengembangan fasilitas wisata, penyusunan regulasi yang ramah terhadap masyarakat, serta penyederhanaan proses perizinan bagi kegiatan pariwisata. Sementara itu, Pokdarwis memberikan masukan dari lapangan terkait kebutuhan pengunjung, potensi wisata baru, hingga tantangan praktis yang muncul dalam pengelolaan sehari-

hari (Cahyadi & Wibowo, 2021). Relasi semacam ini menciptakan ruang komunikasi dua arah, di mana setiap kebijakan yang dirumuskan selalu didasarkan pada data dan pengalaman empiris dari masyarakat pelaksana di lapangan.

Salah satu hasil nyata dari relasi konstruktif ini adalah munculnya berbagai bentuk inovasi dalam pengelolaan pariwisata desa. Misalnya, pengembangan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat lokal dalam bidang pemanduan wisata, pengelolaan homestay, atau kerajinan tangan yang memiliki nilai jual tinggi. Inovasi lainnya bisa berupa penciptaan produk wisata berbasis budaya lokal, seperti pertunjukan seni tradisional, kuliner khas, dan kegiatan wisata partisipatif seperti live-in atau wisata edukasi pertanian (Moscardo, 2008). Inisiatif-inisiatif ini lahir karena adanya ruang kreasi yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan didorong oleh semangat kewirausahaan masyarakat yang tergabung dalam Pokdarwis.

Tidak hanya berfokus pada aspek pengembangan, relasi konstruktif ini juga sangat penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dari aktivitas pariwisata. Masalah-masalah seperti pengelolaan sampah di area wisata, dampak negatif terhadap lingkungan, ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi, hingga konflik antarwarga terkait penguasaan lahan atau fasilitas dapat ditangani secara lebih bijak melalui kerja sama yang terbuka dan partisipatif. Dalam hal ini, kedua pihak duduk bersama untuk mencari solusi yang adil, kontekstual, dan berkelanjutan (Blackstock, 2005). Pokdarwis menjadi penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat,

sementara pemerintah desa berperan sebagai penengah sekaligus fasilitator penyelesaian konflik.

Lebih jauh, relasi konstruktif juga mendorong terciptanya sistem pengelolaan wisata yang adaptif terhadap perubahan eksternal, seperti krisis kesehatan, bencana alam, atau perubahan preferensi wisatawan. Kolaborasi ini memungkinkan desa untuk merancang strategi tanggap darurat dan diversifikasi produk wisata secara cepat dan efektif, karena masing-masing pihak sudah terbiasa bekerja sama dan berbagi tanggung jawab. Dengan kata lain, relasi konstruktif tidak hanya berkontribusi terhadap pembangunan pariwisata yang berhasil secara ekonomi, tetapi juga menciptakan struktur sosial yang tangguh dan inklusif.

Secara keseluruhan, relasi konstruktif merupakan bentuk ideal dari tata kelola kolaboratif yang menempatkan pemerintah desa dan Pokdarwis sebagai mitra strategis dalam pembangunan pariwisata. Ketika interaksi antaraktor didasarkan pada saling percaya, transparansi, dan komitmen bersama, maka potensi wisata desa dapat dikembangkan secara maksimal dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Meskipun relasi antara pemerintah desa dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengelolaan objek wisata desa menunjukkan banyak aspek positif dan potensial, realitas di lapangan tetap menyuguhkan sejumlah tantangan yang tidak bisa diabaikan (Hidayat et al., 2020). Tantangan-tantangan tersebut mencerminkan kompleksitas dalam hubungan antaraktor lokal, khususnya ketika visi, kepentingan, serta kapasitas institusional belum

sepenuhnya sejalan. Salah satu tantangan utama adalah adanya kesenjangan antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa dengan kebutuhan riil masyarakat lokal, terutama yang berkaitan dengan akses, manfaat ekonomi, serta pelestarian budaya dan lingkungan (Saufi et al., 2021). Kebijakan yang bersifat top-down, tanpa proses partisipatif yang memadai, sering kali menghasilkan program pariwisata yang tidak sesuai dengan karakteristik sosial budaya setempat.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan teknis menjadi hambatan struktural yang signifikan. Pemerintah desa sering kali kekurangan tenaga ahli dalam bidang perencanaan wisata, sementara Pokdarwis menghadapi keterbatasan kapasitas dalam hal manajemen, pemasaran, dan pengelolaan layanan wisata secara profesional. Perbedaan pemahaman mengenai konsep pariwisata berkelanjutan juga kerap menimbulkan konflik laten atau kebingungan dalam implementasi kebijakan. Misalnya, pemerintah desa bisa saja fokus pada peningkatan pendapatan desa dalam jangka pendek, sedangkan Pokdarwis lebih menekankan pentingnya pelestarian alam dan budaya dalam jangka panjang. Ketimpangan orientasi ini dapat menghambat koordinasi dan menurunkan efektivitas pengelolaan objek wisata.

Namun demikian, tantangan-tantangan ini juga membuka ruang bagi transformasi relasi yang lebih produktif dan inovatif. Ketika tantangan direspon bukan sebagai hambatan semata, melainkan sebagai pemicu perubahan, maka terbentuklah dinamika relasi yang lebih reflektif dan kolaboratif (Wardana et al., 2019). Komunikasi yang terbuka, berbasis saling

percaya dan transparansi, menjadi elemen kunci untuk menjembatani perbedaan dan membangun pemahaman bersama. Pemerintah desa dan Pokdarwis perlu membangun forum komunikasi rutin yang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menjadi ruang dialog inklusif untuk menyusun solusi yang disepakati bersama.

Partisipasi masyarakat yang luas juga menjadi prasyarat utama dalam menghadapi tantangan ini. Ketika seluruh elemen masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi pariwisata, maka program yang dihasilkan akan lebih kontekstual dan diterima oleh masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas tidak hanya memberdayakan Pokdarwis sebagai aktor utama, tetapi juga mengintegrasikan suara kelompok marginal, seperti perempuan, pemuda, dan kelompok adat, yang sering kali terpinggirkan dalam diskursus pembangunan pariwisata. Penggunaan teknologi digital seperti platform informasi wisata desa, sistem reservasi daring, atau media sosial juga dapat memperkuat posisi desa dalam rantai nilai pariwisata yang lebih luas, sekaligus meningkatkan kapasitas kelembagaan Pokdarwis (Cahyadi & Wibowo, 2021).

Secara keseluruhan, relasi antara pemerintah desa dan Pokdarwis dalam pengelolaan objek wisata merupakan suatu dinamika yang tidak tunggal atau linear, melainkan penuh dengan tarik ulur antara kekuasaan, kesetaraan, dan kolaborasi konstruktif (Wardana et al., 2019). Dinamika ini menuntut adanya kesadaran kritis dari kedua belah pihak untuk tidak hanya menjalankan peran masing-masing secara prosedural, tetapi juga secara substansial, dalam rangka menciptakan tata kelola wisata yang adil, inklusif,

dan berkelanjutan. Pengelolaan objek wisata yang berhasil adalah hasil dari sinergi yang terbangun atas dasar partisipasi aktif, komitmen jangka panjang, serta keberanian untuk terus berinovasi dan belajar dari pengalaman.

Dengan demikian, keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan wisata desa sangat bergantung pada kualitas relasi sosial-politik yang dibangun antara pemerintah desa dan Pokdarwis. Ketika keduanya mampu bergerak dalam satu visi, saling mendukung, dan bersama-sama beradaptasi dengan tantangan yang ada, maka pariwisata desa tidak hanya menjadi motor pertumbuhan ekonomi, tetapi juga wahana pemberdayaan dan transformasi sosial yang bermakna bagi seluruh masyarakat desa.

Berdasarkan hasil observasi, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang mengelola objek wisata Goa Selarong di Kalurahan Guosari, Bantul, menghadapi sejumlah masalah yang menghambat kelancaran operasional dan pengembangan destinasi wisata tersebut. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia. Pokdarwis yang terdiri dari warga setempat seringkali kekurangan anggota yang terlatih untuk menangani jumlah pengunjung yang terus meningkat. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang, terutama pada musim liburan, pengelolaan yang efektif dan pelayanan yang memadai menjadi tantangan besar. Keterbatasan ini mempengaruhi kualitas pelayanan, seperti pemanduan wisata yang tidak maksimal dan kurangnya fasilitas pendukung yang memadai.

Selain itu, pengelolaan sampah juga menjadi masalah signifikan. Seiring dengan peningkatan jumlah pengunjung, volume sampah yang

dihadirkan di sekitar area wisata juga meningkat. Meskipun sudah ada upaya untuk menyediakan tempat sampah, namun terkadang kesadaran wisatawan tentang pentingnya menjaga kebersihan masih kurang. Hal ini menambah beban Pokdarwis dan pemerintah desa dalam menjaga kebersihan lingkungan wisata. Untuk mengatasinya, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada pengunjung serta penguatan fasilitas pengelolaan sampah, seperti pemisahan sampah organik dan non-organik, serta sistem daur ulang yang lebih efektif.

Masalah lainnya adalah kurangnya promosi yang efektif. Meskipun Goa Selarong sudah cukup dikenal di kalangan wisatawan lokal, namun promosi untuk menarik wisatawan internasional masih terbatas. Banyaknya destinasi wisata serupa yang ada di daerah sekitar membuat persaingan semakin ketat, sehingga Goa Selarong perlu lebih dikenal di pasar yang lebih luas. Pokdarwis dan Pemerintah Desa Guosari berupaya untuk memperkenalkan wisata Goa Selarong melalui media sosial, tetapi akses promosi yang lebih luas, seperti kerja sama dengan agen perjalanan dan platform digital pariwisata, masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, relasi antara pemerintah desa dan kelompok sadar wisata merupakan suatu dinamika yang melibatkan kekuasaan, kesetaraan, dan kolaborasi konstruktif. Pengelolaan objek wisata yang efektif dan berkelanjutan memerlukan komitmen dari kedua belah pihak untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama yang menguntungkan seluruh masyarakat desa. Pengelolaan pariwisata yang berbasis pada prinsip keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat, serta partisipasi aktif akan memberikan dampak

positif tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam pelestarian budaya dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Meskipun Pokdarwis telah melakukan berbagai upaya dalam mengelola wisata Goa Selarong, mereka masih dihadapkan pada tantangan besar terkait pengelolaan sumber daya manusia, sampah, dan promosi. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan kerjasama yang lebih erat dengan Pemerintah Desa, pihak terkait, serta masyarakat setempat untuk meningkatkan kapasitas, fasilitas, dan jangkauan promosi agar Goa Selarong dapat berkembang lebih baik lagi di masa depan

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berangkat dari kerangka berpikir bahwa relasi antara aktor-aktor dalam pengelolaan wisata, seperti pemerintah kalurahan, Dinas Pariwisata, dan kelompok masyarakat, tidak berdiri dalam ruang yang netral, melainkan dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang kompleks. Dalam memahami dinamika relasi antar aktor dalam pengelolaan objek wisata, penelitian ini dapat ditinjau melalui empat pendekatan teoretis utama. Antonio Gramsci menekankan konsep relasi hegemonik, yakni bagaimana kelompok dominan mempertahankan kekuasaan bukan melalui paksaan fisik, melainkan melalui hegemoni budaya yang diwujudkan lewat nilai, norma, pendidikan, dan media. Dalam konteks ini, institusi-institusi seperti pemerintah dan birokrasi lokal sering kali memainkan peran sebagai agen yang menormalisasi dominasi melalui mekanisme simbolik dan ideologis.

Berbeda dengan itu, John Locke mengusung pandangan relasi egaliter, di mana prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia menjadi dasar hubungan sosial. Melalui kontrak sosial dan sistem demokrasi, setiap individu idealnya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya publik seperti pariwisata. Relasi ini menjadi kerangka untuk menilai sejauh mana masyarakat lokal dilibatkan secara adil dalam proses kebijakan.

Sementara itu, Karl Marx menawarkan kerangka relasi konfliktual, yang melihat relasi sosial sebagai arena pertentangan kelas antara kelompok yang menguasai sumber daya dan mereka yang tereksplorasi. Dalam sistem kapitalis, relasi semacam ini menciptakan ketimpangan struktural dan alienasi, yang juga dapat tercermin dalam pengelolaan wisata ketika aktor lokal hanya dijadikan pelaksana tanpa kendali atas hasil ekonomi.

Di sisi lain, Lev Vygotsky memperkenalkan pendekatan relasi konstruktif, yang menempatkan interaksi sosial sebagai fondasi utama dalam proses pembangunan pengetahuan dan kapasitas. Melalui konsep Zone of Proximal Development (ZPD), Vygotsky menjelaskan bahwa kolaborasi antarpihak seperti antara pemerintah desa dan kelompok sadar wisata dapat menciptakan ruang belajar bersama yang mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan komunitas.

Oleh karena itu, agar penelitian ini menjadi terarah dan sistematis, maka peneliti menegaskan jangkauan dan ruang lingkup sebagai batasan dalam penelitian. Penelitian ini menyoroti bagaimana keempat bentuk relasi tersebut yakni relasi hegemonik, egaliter, konfliktual, dan konstruktif berinteraksi

dalam konteks pengelolaan objek wisata Goa Selarong, serta sejauh mana masing-masing aktor memiliki ruang partisipasi yang sejati

1. Relasi Hegemoni
2. Relasi Egaliter
3. Relasi Konfliktual
4. Relasi Konstruktif

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Model Relasi Pemerintah Kalurahan Guwosari dengan Kelompok Sadar Wisata dalam Pengelolaan Objek Wisata Goa Selarong?”

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian inni adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Relasi Hegemoni Pemerintah Desa Guwosari dalam membaganun Relasi dengan Kelompok Sadar Wisata dalam pengelolaan Objekwisata Goa Selarong
2. Untuk mengetahui bagaimana Relasi Egaliter Pemerintah Desa Guwosari dalam membaganun Relasi dengan Kelompok Sadar Wisata dalam pengelolaan Objekwisata Goa Selarong

3. Untuk mengetahui bagaimana Relasi Konseptual Pemerintah Desa Guwosari dalam membangun Relasi dengan Kelompok Sadar Wisata dalam pengelolaan Objekwisata Goa Selarong
4. Untuk mengetahui bagaimana Relasi Konstruktif Pemerintah Desa Guwosari dalam membangun Relasi dengan Kelompok Sadar Wisata dalam pengelolaan Objekwisata Goa Selarong

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Akademis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Pemerintah-negara, dengan masyarakat sipil dalam mengembangkan potensi kelurahan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya

b. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi bagi Pemerintah Kalurahan Guwosari dalam menjalani pembangunan dengan pola pembangunan partisipatif, agar masyarakat sipil juga dapat berpartisipasi dalam agenda pembangunan Kalurahan khususnya dalam pengelolaan Objekwisata Goa Selarong.

F. Literatur Review

1. Penelitian yang dilakukan oleh Armela Shintani (2020) dengan judul penelitian *Relasi Pemerintah Daerah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Di Kelurahan Sei Gohong*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata di Sei Gohong, hal ini terlihat dari interaksi ketiga pemangku kepentingan. Pemerintah sebagai fasilitator yang memfasilitasi kebutuhan pariwisata, hal-hal yang belum terpenuhi dalam penyediaan jasa pariwisata oleh pemerintah dilengkapi dengan pihak swasta sebagai penyedia dan penyelenggara jasa pariwisata yaitu akomodasi berupa penginapan (villa) dan Masyarakat di kawasan wisata turut berpartisipasi dengan mengelola wisata Sei Gohong melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Namun pengelolaan destinasi wisata tersebut hanya melibatkan pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Palangkaraya bersama masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang terlibat langsung dalam pengelolaan pariwisata di Sei Gohong. Sedangkan pihak swasta secara tidak langsung berperan sebagai penyedia dan penyedia jasa karena dampak dari hadirnya pariwisata(Armela Shintani, 2020).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Imam, Taofik Chaerul (2017) dengan judul kajian *Relasi Intraorganisasi Pemerintah Kota Batu Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah*. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa Pertama, Pemerintah

Kota Batu ingin memaksimalkan kelebihan yang dimiliki melalui sektor pariwisata. *Kedua*, pembuatan kebijakan yang menarik supaya investor mau mendirikan tempat wisata di Kota Batu. *Ketiga*, dibutuhkan relasi organisasi yang baik untuk bekerja sama dengan dinas-dinas yang terlibat. *Keempat*, berhasilnya menarik investor sehingga jumlah tempat wisata dikota Batu bertambah. *Kelima*, dengan semakin banyaknya tempat wisata jumlah pengunjung meningkat setiap tahunnya sehingga mempengaruhi pendapatan daerah melalui sektor pariwisata. *Keenam*, terdapat saling cari informasi yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kota Batu (Imam, 2017)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Regita Indryani Sitepu (2022) dengan judul penelitian *Relasi Pemerintah Desa Dan Kelompok Sadar Wisata Dalam Mengelola Desa Wisata Di Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati*. Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, dalam relasi antara Pemerintah Desa dan Pokdarwis ada tujuan yang sama yaitu memelihara, mengembangkan dan mempromosikan potensi yang ada di desa wisata serta memberi ruang bagi masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. *Kedua*, dalam relasi Pemerintah Desa memiliki tugas mendampingi, memfasilitasi, monitoring dan mengevaluasi kegiatan kepariwisataan. Sedangkan, Pokdarwis memiliki tugas sebagai pengelola utama yang dipercaya oleh pemerintah desa yaitu mengembangkan, melaksanakan, mengelola serta mempromosikan potensi wisata, namun kurang maksimal karena Pandemi Covid 19. *Ketiga*, dalam relasi antara Pemerintah Desa dan Pokdarwis Di Desa Tirtoadi, kepercayaan dan sikap

saling menghargai adalah dasar untuk mencapai tujuan. Pemerintah Desa Tirtoadi memberikan Kepercayaan kepada Pokdarwis untuk mengelola wisata seperti sewa lahan, parkiran, embung, dll bersama BUMDes. Dan untuk menjaga kepercayaan Pemerintah desa, Pokdarwis memberikan laporan tentang perkembangan pengelolaan Wisata. *Keempat*, dalam relasi pemerintah Desa dan Pokdarwis Tirtoadi merasakan manfaat yaitu pemerintah desa merasa tugas dan kewenangannya dibantu dengan keberadaan pokdarwis, sedangkan pokdarwis merasakan peran dan partisipasi sebagai sujek pembangunan yang dekat dengan wisata (Putri Regita Indryani Sitepu, 2022).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hary Hermawan (2016) dengan judul penelitian *Dampak Pengembangan Desa Wisatanglanggeran Terhadapekonomi Masyarakat Lokal*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata membawa dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat lokal di Desa Nglanggeran, di antaranya: penghasilan masyarakat meningkat; meningkatkan peluang kerja dan berusaha; meningkatkan kepemilikan dan kontrol masyarakat lokal; serta meningkatkan pendapatan pemerintah melalui retribusi wisata. Sedangkan indikasi dampak negatif terhadap ekonomi lokal berupa kenaikan harga barang tidak ditemukan (Hermawan, 2016).
5. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Mega Wahyuyusifa (2021) dengan judul *Pengelolaan Objek Wisata Senjoyo Di Kabupaten Semarang*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pengelolaan objek wisata Senjoyo semakin terkelola dengan peningkatan fasilitas serta perbaikan

akses jalan menuju objek wisata Senjoyo. (2) hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan objek wisata Senjoyo yaitu: a) minimnya pendapatan yang diperoleh b) belum maksimalnya kepengurusan dalam sistem pengelolaan di objek wisata Senjoyo c) kurangnya kesadaran pengunjung akan kebersihan d) keamanan di objek wisata Senjoyo yang masih sangat kurang e) belum maksimalnya koordinasi pemerintah desa yang menjadikan belum adanya peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan Senjoyo sehingga pengelolaannya masih berjalan seadanya. Hal yang dapat dilakukan pada pengelolaan objek wisata Senjoyo diantaranya adalah dengan membuat kebijakan pembayaran tiket masuk sebagai pemasukan yang dapat digunakan sebagai pengembangan Objekwisata tersebut (Wahyuyusifa, 2021)

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ingga Purwanti (2019) dengan judul *Strategi Kelompok Sadar Wisata Dalam Penguatan Desa Wisata*. Hasil dari penelitian ini adalah Strategi Kelompok Sadar Wisata dalam penguatan desa wisata Kampung wisata kungkuk yaitudengan adanya kelompok sadar wisata sehingga dapat membantu dalam suatu pengajuan kepada Dinas Pariwisata yaitu berupa sarana dan prasarana yang berbentuk fasilitasfasilitas dan sebagai pelaku dalam promosi wisata (Purwanti, 2019)
7. Penelitian yang dilakukan oleh Ruyandi Vember (2024) dengan judul penelitian *Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Governance Di Kalurahan Jerukwudel Kapanewon Girisubo*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Relasi antara pemerintah desa dengan

pelaku wisata dan masyarakat dalam Perencanaan Desa Wisata berjalan dengan baik. Akan tetapi, pihak pihak yang terlibat Perencanaan belum semua terlibat ataupun dilibatkan oleh Pemerintah Desa sehingga masyarakat dalam perencanaan desa wisata tidak diketahui bagaimana hasil Musyawarah yang dilakukan Pemerintah Desa baik masyarakat dan Organisasi Pokdarwis. Kedua, Relasi antara pemerintah desa dengan pelaku wisata dan masyarakat dalam Pengorganisasian Pemerintah Desa seharusnya berkaitan dengan Relasi belum bisa dikatakan berjalan dengan baik dikarenakan Pemerintah Desa hanya sebatas kepentingan secara administrasi saja sehingga dalam pengelolaan Objek Wisata yang ada di Kalurahan Jerukwudel tidak berjalan sesuai dengan pengelolaan Desa Wisata yang baik. Ketiga, Relasi Pelaksanaan dalam Pengelolaan desa wisata khususnya embung ngrancah harus lebih dikelola dengan baik serta pemerintah desa harus campur tangan sepenuhnya dalam pengelolaan ataupun pelaksanaannya agar tidak dikelola sendiri-sendiri demi membantu perekonomian masyarakat setempat dengan berjualan disekitaran embung (Vember, 2024)

G. Kerangka Konseptual

Penelitian ini melihat relasi pemerintah kalurahan dari: teori hegemoni, teori egaliter, teori konflikual dan teori konstruktif

1. Relasi Hegemoni

Definisi kekuasaan juga dapat dianalisis melalui teori hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci (1891-1937), seorang filsuf Italia yang dikenal sebagai pemikir Neo-Marxisme. Menurut Patria dan Arief (1999), Gramsci mengembangkan konsep hegemoni sebagai kontribusi asli dalam teori sosial dan filsafat selama masa penahanannya hingga kematianya. Definisi kekuasaan yang disampaikan oleh Gramsci berbeda dengan pandangan Michel Foucault. Bagi Gramsci, kekuasaan adalah suatu bentuk kepemilikan yang perlu dipertahankan melalui ideologi, di mana kelas yang berkuasa mengendalikan dan memimpin kelas bawah melalui kekuatan atau konsensus yang dikenal sebagai ideologi atau hegemoni (Tami, Zurmailis, & dkk, 2021).

Hegemoni, sebagai konsep yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci, seorang filsuf Italia dan pemikir utama dalam tradisi Neo-Marxisme, telah memberikan kontribusi yang mendalam dalam memahami cara kekuasaan bekerja dalam masyarakat. Konsep ini tidak hanya berfokus pada dominasi politik atau ekonomi yang terlihat secara eksplisit, tetapi juga pada cara-cara halus di mana kelompok yang berkuasa dapat mempengaruhi dan mengontrol kehidupan sosial, budaya, dan ideologi masyarakat melalui penerimaan, kesepakatan, dan konsensus. Gramsci mengembangkan ideologi hegemoni dalam konteks perjuangan kelas dan ketegangan sosial, terutama ketika ia sedang berada dalam penjara selama rezim

Mussolini pada 1920-an. Meskipun kekuasaan sering diartikan dalam bentuk fisik atau ekonomis, Gramsci berargumen bahwa kekuasaan yang sejati dan lebih tahan lama terdapat dalam kemampuan untuk mengendalikan ide dan cara berpikir (Sugiyono, 1999).

Menurut Antonio Gramsci, hegemoni adalah bentuk dominasi yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik atau politik, tetapi lebih kepada pengendalian ideologi dan budaya. Hegemoni berfungsi sebagai cara bagi kelas penguasa untuk menciptakan konsensus sosial yang mendukung sistem kekuasaan mereka, dengan meyakinkan kelas-kelas lain bahwa nilai-nilai, norma, dan pandangan dunia yang mereka anut adalah "hal yang alami" atau "benar." Dalam pandangan Gramsci, kekuasaan yang paling efektif bukanlah kekuasaan yang terlihat atau langsung dipaksakan, melainkan kekuasaan yang diterima oleh masyarakat melalui mekanisme budaya dan ideologi (Safitri et al., 2024).

Kelas borjuis, yang memegang kendali atas alat produksi dan lembaga-lembaga utama dalam masyarakat, dapat mempertahankan dominasi mereka tidak hanya dengan menguasai ekonomi dan politik, tetapi juga dengan mempengaruhi sistem nilai yang mendasari kehidupan sosial. Dalam konteks ini, ideologi yang mendukung kapitalisme dan ketidaksetaraan sosial dianggap sebagai sesuatu yang diterima secara alami, bahkan oleh mereka yang tertindas. Ini menciptakan kondisi di mana kelas bawah tidak hanya

patuh terhadap sistem yang ada, tetapi juga menerima ketidakadilan sebagai bagian dari tatanan sosial yang tidak bisa diubah (Aziz, 2021). Namun, menurut Gramsci, hegemoni tidak terjadi secara otomatis. Ia adalah hasil dari perjuangan ideologis yang panjang dan kompleks. Proses ini melibatkan pembentukan konsensus yang luas di kalangan berbagai kelompok sosial, termasuk mereka yang berada di luar kelas dominan. Melalui lembaga-lembaga sosial, seperti pendidikan, media, agama, dan seni, kelas dominan menyebarkan pandangan dunia mereka yang kemudian diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini, kekuasaan yang dijalankan oleh kelas borjuis menjadi tersembunyi dalam nilai-nilai yang diyakini oleh mayoritas, yang merasa bahwa sistem tersebut adalah bagian dari tatanan sosial yang wajar (Aziz, 2021).

Selain hegemoni, konsep kesadaran kelas (class consciousness) sangat penting dalam teori Gramsci. Kesadaran kelas berfungsi sebagai jalan bagi kelas tertindas untuk menyadari posisinya dalam struktur sosial dan ekonomi. Gramsci berpendapat bahwa untuk melawan dominasi ideologis dan budaya yang dijalankan oleh kelas penguasa, kelas proletariat (pekerja) harus mengembangkan kesadaran kelas yang lebih tinggi. Kesadaran kelas ini tidak hanya berarti memahami kondisi ekonomi mereka, tetapi juga menyadari bagaimana sistem sosial dan ideologi yang ada mengatur dan mempertahankan posisi mereka yang tertindas (Siswati, 2017).

Kesadaran kelas menurut Gramsci berbeda dari pandangan tradisional Marxis tentang kesadaran kelas sebagai hasil dari kondisi ekonomi yang objektif. Gramsci berpendapat bahwa kesadaran kelas bukanlah sesuatu yang muncul secara otomatis hanya karena kondisi material atau ekonomi. Sebaliknya, kesadaran kelas harus dibangun melalui proses pendidikan, pengorganisasian, dan mobilisasi yang aktif. Kelas tertindas perlu memahami bahwa kondisi yang mereka alami bukanlah hasil dari "takdir" atau "keadaan alami," tetapi adalah hasil dari struktur sosial yang bisa diubah. Untuk mencapai kesadaran ini, mereka harus terlebih dahulu memahami bagaimana sistem ideologi yang ada bekerja untuk mempertahankan status quo (Siswati, 2017).

Proses pembentukan kesadaran kelas ini tidak mudah, karena sistem ideologi yang diterima oleh masyarakat telah mengakar begitu dalam. Masyarakat, termasuk kelas pekerja, seringkali menerima ideologi dominan yang disebarluaskan oleh kelas penguasa sebagai kebenaran yang tak terbantahkan. Oleh karena itu, Gramsci menekankan perlunya suatu bentuk "perang posisi" sebuah upaya untuk meruntuhkan dominasi ideologis secara bertahap dan memperkenalkan alternatif ideologi yang lebih kritis terhadap sistem sosial yang ada (Siswati, 2017).

Gramsci juga mengidentifikasi dua strategi utama dalam perjuangan kelas untuk melawan hegemoni dan membangun kesadaran kelas yakni perang posisi dan perang gerilya. Perang

posisi adalah strategi yang lebih lambat dan terencana untuk melawan hegemoni. Perang posisi berfokus pada perlawanan dalam arena sosial, budaya, dan ideologis. Dalam konteks ini, kelas tertindas harus terlebih dahulu merebut ruang-ruang budaya dan sosial di mana ideologi dominan diciptakan dan dipertahankan. Hal ini melibatkan pembentukan alternatif ideologi yang lebih adil dan lebih sesuai dengan kepentingan kelas pekerja. Organisasi sosial dan politik yang memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan hak-hak pekerja berperan penting dalam membangun kesadaran kelas yang lebih kritis terhadap sistem yang ada (Junaidi, 2021).

Sebaliknya, perang gerilya mengacu pada taktik perlawanan yang lebih langsung dan revolusioner. Ini adalah serangkaian aksi yang lebih terbuka dan militan yang bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan yang ada. Dalam konteks ini, perlawanan kelas pekerja dapat mencakup pemogokan massal, revolusi sosial, dan bentuk-bentuk perlawanan langsung lainnya yang bertujuan untuk menantang struktur kekuasaan secara radikal. Namun, Gramsci lebih menekankan pentingnya perang posisi sebagai strategi utama dalam menghadapi hegemoni, karena ia menyadari bahwa untuk menggulingkan ideologi dominan, kelas tertindas harus terlebih dahulu memperoleh ruang dalam lembaga-lembaga sosial dan budaya. Setelah itu, mereka bisa memobilisasi perubahan yang lebih besar dalam tatanan politik dan ekonomi (Firmansyah & Auliya, 2022).

Bagi Gramsci, hegemoni dan kesadaran kelas adalah elemen-elemen yang saling terkait dalam proses perubahan sosial. Hegemoni kelas dominan beroperasi dengan cara yang sangat halus, membuat struktur sosial dan ketidakadilan tampak wajar dan diterima begitu saja. Namun, untuk mewujudkan perubahan sosial yang nyata, kelas tertindas harus mengembangkan kesadaran kelas yang lebih tinggi, yang akan mendorong mereka untuk mempertanyakan, menantang, dan akhirnya menggulingkan ideologi yang ada (Siswati, 2017).

Gramsci percaya bahwa perjuangan untuk kesadaran kelas dan perlawanan terhadap hegemoni harus dilakukan secara kolektif. Kesadaran kelas bukan hanya tentang kesadaran individu, tetapi tentang menciptakan sebuah gerakan sosial yang dapat memobilisasi rakyat untuk mencapai perubahan revolusioner. Dalam proses ini, kelas tertindas harus membangun "blok sejarah" yang luas, melibatkan berbagai kelompok sosial dan politik, untuk memperjuangkan perubahan dalam struktur kekuasaan yang ada (Firmansyah & Auliya, 2022).

Hegemoni terjadi ketika kelas proletar atau masyarakat bawah menerima cara berpikir, perspektif, dan gaya hidup yang diterapkan oleh kelompok yang menguasai dan mengeksplorasi mereka. Hegemoni menghasilkan kepatuhan, yaitu sikap menerima keadaan tanpa pertanyaan, karena ideologi atau norma yang diterapkan oleh elit telah disetujui (Gramsci, 1971). Gramsci menyadari bahwa kekuasaan hegemoni kaum borjuis tidak hanya

bergantung pada kekuatan ekonomi dan politik, tetapi juga pada kemampuannya menciptakan sistem nilai dan konsep yang diyakini oleh masyarakat. Meskipun kelompok tertindas sadar akan keberadaan hegemoni ini, mereka menerima dan menganggapnya sebagai hal yang biasa dan bahkan tak terhindarkan (Hutagalung Daniel, 2004).

Kekuasaan hegemoni memiliki ciri khas, di mana kekuasaan tersebut terkait dengan keyakinan, aspirasi, dan pandangan normatif masyarakat secara keseluruhan. Menurut Gramsci, kesadaran kelas dan kapasitas proletariat untuk berorganisasi internal dapat memicu aktivitas politik yang proaktif, yang pada akhirnya dapat memobilisasi rakyat untuk mendukung perubahan revolusioner. Gramsci berpendapat bahwa perlawanan selalu muncul di tempat ada kekuasaan, dan seiring dengan kemajuan kapitalisme, diperlukan strategi yang berbeda dalam melawan kekuasaan dominan. Strategi ini disebut Gramsci sebagai "perang posisi" (Suyanto & Amal, 2010)

Secara keseluruhan, bagi Gramsci, hegemoni adalah konsep yang menjelaskan bagaimana kelas penguasa dapat mempertahankan dominasi mereka melalui ideologi dan budaya. Hegemoni bukan hanya kontrol atas alat produksi atau kekuatan politik, tetapi kontrol atas cara-cara berpikir dan pemahaman masyarakat. Namun, meskipun dominasi ini tampak kuat, Gramsci meyakini bahwa perlawanan selalu mungkin. Kelas tertindas dapat

melawan dominasi ideologis yang ada dengan membangun kesadaran kelas yang lebih kritis terhadap sistem yang ada. Melalui perang posisi dan perang gerilya, kelas pekerja dan kelompok-kelompok tertindas lainnya dapat menciptakan perubahan sosial yang revolusioner, menggulingkan tatanan yang menindas, dan membangun dunia yang lebih adil.

2. Relasi Egaliter

Relasi egaliter, yaitu hubungan yang didasarkan pada prinsip kesetaraan, telah menjadi topik yang mendalam dibahas oleh berbagai filsuf sepanjang sejarah. Kesetaraan dalam hubungan sosial mencakup pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak yang setara dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, serta saling menghormati tanpa diskriminasi atau ketidakadilan. Banyak filsuf mengembangkan konsep ini dengan berbagai pendekatan untuk memahami bagaimana relasi egaliter dapat diwujudkan dalam Masyarakat (Bolu, 2023)

Berbera filsuf memberikan devinis terkatin Relasi Egaliter Sebagai berikut. Pertama John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, terkenal dengan teori-teori politiknya yang membahas hak-hak individu dan kontrak sosial. Locke berargumen bahwa setiap individu dilahirkan dengan hak alamiah yang tidak dapat dicabut, yaitu hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti. Menurut Locke, relasi sosial yang egaliter harus didasarkan pada pengakuan terhadap hak-hak ini, yang menjamin kebebasan individu untuk

hidup, berpikir, dan bertindak sesuai dengan kehendaknya, selama tidak melanggar hak orang lain. Bagi Locke, kesetaraan bukan berarti bahwa semua individu harus memiliki kekayaan atau status yang sama, tetapi lebih pada pengakuan bahwa semua orang memiliki hak yang setara untuk memperoleh kebebasan dasar mereka. Dalam teori kontrak sosialnya, Locke mengusulkan bahwa negara dibentuk untuk melindungi hak-hak alamiah ini. Negara yang sah hanya dapat dibentuk dengan persetujuan rakyat, dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang setara untuk menikmati kebebasan dan keamanan (Firmansyah & Auliya, 2022).

Locke juga mengajukan gagasan bahwa dalam keadaan alami (sebelum pembentukan negara), individu memiliki kebebasan yang penuh untuk mengatur hidup mereka, namun kebebasan ini terbatas oleh hukum alam yang mengharuskan setiap orang menghormati hak orang lain. Dalam masyarakat yang lebih maju, kontrak sosial yang disepakati oleh individu-individu harus berdasarkan prinsip kesetaraan, di mana setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum dan memiliki kekayaan atau properti mereka (Siswadi, 2024).

Sementara itu, Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf asal Prancis yang hidup pada abad ke-18, mengembangkan konsep yang lebih radikal tentang relasi egaliter dalam masyarakat. Dalam karya terkenalnya, *The Social Contract*, Rousseau menyatakan bahwa

“manusia dilahirkan bebas, tetapi di mana-mana ia berada dalam belenggu.” Rousseau berpendapat bahwa meskipun manusia pada awalnya hidup dalam kesetaraan dan kebebasan alami, peradaban dan pembentukan masyarakat justru membawa ketidaksetaraan. Dalam pandangannya, institusi sosial, ekonomi, dan politik yang ada telah menciptakan ketimpangan antara yang kaya dan miskin, serta antara yang berkuasa dan yang dikuasai (Rousseau, 1986).

Untuk menciptakan relasi sosial yang benar-benar egaliter, Rousseau mengusulkan kontrak sosial yang berbeda dari yang diajukan oleh Locke. Dalam konsepnya, kontrak sosial bukan hanya tentang perlindungan hak individu, tetapi juga tentang pembentukan kehendak umum (*general will*) yang mencerminkan kepentingan bersama. Rousseau berargumen bahwa untuk mencapai masyarakat yang bebas dan setara, setiap individu harus menyerahkan sebagian kebebasannya untuk kepentingan umum, tetapi hanya untuk membentuk masyarakat yang lebih adil dan merata. Kehendak umum ini, bagi Rousseau, adalah kehendak kolektif yang mewakili kebaikan bersama, dan dengan demikian, mengatasi dominasi kelompok atau individu yang memiliki kekuasaan atau kepentingan pribadi (Rousseau, 1986).

Relasi egaliter, dalam pandangan Rousseau, berhubungan erat dengan konsep kesetaraan sosial, yang berarti tidak ada perbedaan status atau kekayaan yang mencolok antara individu dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang ideal menurut Rousseau, tidak

ada sistem kelas yang membedakan penguasa dan yang dikuasai, dan semua orang seharusnya memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan kekuasaan. Namun, untuk mewujudkan masyarakat yang egaliter ini, diperlukan pembentukan nilai-nilai moral dan sosial yang baru, yang hanya bisa tercapai melalui pendidikan dan pembentukan kesadaran kolektif (Rousseau, 1986).

Sedangkan Karl Marx dalam pandangannya menjelaskan bahwa relasi egaliter atau kesetaraan sosial tidak hanya berkaitan dengan pengakuan hak individu atau kebebasan pribadi, tetapi juga dengan struktur ekonomi dan hubungan produksi dalam masyarakat. Marx, seorang filsuf dan ekonom asal Jerman abad ke-19, mengembangkan analisis yang mendalam mengenai bagaimana kapitalisme menciptakan ketidaksetaraan sosial yang mendalam antara kelas-kelas. Menurutnya, untuk mewujudkan relasi yang benar-benar egaliter, perubahan harus dilakukan pada dasar-dasar struktur ekonomi, yaitu dengan menghapuskan kapitalisme dan menggantinya dengan masyarakat komunis tanpa kelas (Karl Marx, 1867).

Bagi Marx, kapitalisme adalah sistem yang berakar pada eksloitasi kelas pekerja (proletariat) oleh kelas penguasa (borjuis). Dalam masyarakat kapitalis, sebagian besar produksi dan sumber daya ekonomi dikuasai oleh borjuis, sementara proletariat yang bekerja di sektor-sektor produksi tidak memiliki kontrol atas hasil kerjanya. Ketidaksetaraan ini muncul karena sistem kerja yang tidak

adil, di mana pekerja menghasilkan nilai lebih (surplus value), namun hanya menerima sebagian kecil dari nilai tersebut, sementara kapitalis mengakumulasi keuntungan dari kerja pekerja. Ketidaksetaraan ini menciptakan hubungan sosial yang tidak egaliter, di mana satu kelas (borjuis) mengendalikan kekuasaan ekonomi dan produksi, sementara kelas pekerja (proletariat) terpaksa menjual tenaga kerja mereka untuk bertahan hidup, tanpa mendapatkan bagian yang adil dari nilai yang mereka hasilkan (Karl Marx, 1867).

Menurut Marx, untuk mewujudkan relasi sosial yang egaliter, kapitalisme harus digulingkan dan digantikan oleh sosialisme atau komunisme. Dalam masyarakat komunis yang ideal, tidak ada lagi pembagian kelas antara borjuis dan proletariat. Semua alat produksi, seperti pabrik, tanah, dan sumber daya alam, akan dimiliki bersama oleh masyarakat, dan hasil produksi akan dibagi secara adil di antara semua orang. Dalam sistem ini, tidak ada individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi yang besar sementara lainnya terperangkap dalam ketidakpastian hidup. Semua orang akan memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses sumber daya dan menikmati hasil produksi. Dengan demikian, tidak ada lagi pembagian antara pemilik dan pekerja, karena semua individu akan berpartisipasi secara kolektif dalam proses produksi dan distribusi sumber daya (Karl Marx, 1867).

Marx juga menekankan bahwa kebebasan sejati hanya dapat tercapai dalam masyarakat yang egaliter, di mana struktur sosial dan ekonomi tidak lagi menciptakan pembagian kekayaan dan kekuasaan yang tidak adil. Dalam kapitalisme, kebebasan individu seringkali terbatas oleh ketergantungan pada pasar tenaga kerja, di mana individu terpaksa menjual tenaga kerja mereka untuk bertahan hidup. Namun, dalam masyarakat komunis, kebebasan akan tercapai melalui penghapusan alienasi, yaitu keadaan di mana individu merasa terasing dari hasil kerjanya karena mereka tidak memiliki kontrol atas proses produksi. Dalam masyarakat tanpa kapitalisme, individu akan memiliki kontrol penuh atas proses produksi dan distribusi sumber daya, yang memungkinkan mereka untuk berkembang secara bebas dan mencapai potensi mereka tanpa hambatan struktural kelas (Karl Marx, 1867).

Marx berpendapat bahwa relasi egaliter tidak bisa tercapai melalui reformasi bertahap dalam sistem kapitalis yang ada, melainkan melalui perjuangan kelas yang radikal. Kelas pekerja harus bersatu untuk menggulingkan sistem kapitalisme melalui revolusi sosial. Setelah revolusi, negara akan bertugas mengatur dan mendistribusikan sumber daya secara adil, hingga akhirnya negara itu sendiri akan "layu" dan digantikan oleh masyarakat tanpa kelas dan tanpa negara. Relasi egaliter, dalam pandangan Marx, hanya dapat terwujud melalui transformasi sosial yang mendalam, yang melibatkan perubahan cara produksi dan distribusi kekayaan.

Dengan perubahan ini, akan terbentuk masyarakat tanpa kelas, di mana setiap individu memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka (Karl Marx, 1867)

Sementara itu John Rawls seorang filsuf politik dalam karyanya yang terkenal *A Theory of Justice*, mengemukakan teori keadilan yang berfokus pada prinsip-prinsip yang dapat menciptakan masyarakat yang adil dan egaliter. Rawls menyusun teori ini untuk menawarkan dasar moral bagi pembentukan dan struktur masyarakat yang ideal, dengan menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai dasar yang mendasari pembagian sumber daya dan kesempatan dalam masyarakat. Teori keadilan Rawls berlandaskan pada dua prinsip utama yang dikenal dengan istilah principle of justice. Prinsip *pertama*, adalah Prinsip Kebebasan Setara, yang menyatakan bahwa setiap individu harus memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasar, yang mencakup kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, serta kebebasan politik lainnya. Kebebasan ini, menurut Rawls, harus diterima oleh setiap orang secara setara tanpa ada yang lebih diuntungkan atau dirugikan dalam hal akses terhadap kebebasan tersebut (Rawls, 1971). Prinsip *kedua*, yang lebih kompleks, adalah Prinsip Perbedaan. Prinsip ini menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat hanya dapat diterima jika ketidaksetaraan tersebut menguntungkan anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Dengan kata lain, meskipun dalam

masyarakat mungkin ada perbedaan dalam distribusi kekayaan atau kekuasaan, ketidaksetaraan tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga mereka yang berada pada posisi paling rendah tetap mendapat keuntungan atau perbaikan dari sistem tersebut. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketidaksetaraan tidak merugikan kelompok yang paling terpinggirkan (Rawls, 1971).

Rawls mengembangkan teori ini melalui konsep yang disebut "tirai ketidaktahuan" (veil of ignorance), yang merupakan suatu eksperimen mental untuk merancang prinsip-prinsip keadilan dalam situasi di mana individu tidak mengetahui posisi sosial mereka, kekayaan mereka, atau status lainnya. Dalam kondisi ini, Rawls berargumen bahwa individu akan lebih cenderung memilih prinsip-prinsip keadilan yang melindungi hak-hak dasar setiap orang dan mendukung kesejahteraan mereka yang paling tidak beruntung. Dengan kata lain, dalam posisi ketidaktahuan tersebut, orang akan lebih memilih sistem sosial yang adil dan setara untuk menghindari ketidakadilan yang mungkin mereka alami jika mereka ternyata berada dalam kelompok yang terpinggirkan (Rawls, 1971).

Melalui dua prinsip ini, Rawls berusaha membangun suatu kerangka moral yang memungkinkan adanya keadilan distributif dalam masyarakat, di mana setiap individu diberi kesempatan yang setara untuk berkembang dan menikmati kebebasan dasar mereka. Teori Rawls menekankan bahwa keadilan bukan hanya tentang memberi kebebasan individu, tetapi juga tentang mendistribusikan

manfaat sosial dengan cara yang menguntungkan mereka yang paling membutuhkan. Teori keadilan Rawls, yang dikenal dengan sebutan teori keadilan sebagai fairness (keadilan sebagai kewajaran), berusaha menjawab tantangan bagaimana mengatasi ketidaksetaraan dalam masyarakat dengan cara yang mengutamakan prinsip keadilan sosial dan moralitas universal. Dalam pandangan Rawls, keadilan bukan hanya tentang kesetaraan formal, tetapi juga memastikan bahwa semua individu, terutama yang kurang beruntung, memperoleh kesempatan untuk hidup dengan martabat dan kesejahteraan yang setara (Rawls, 1971).

Sedangkan Martha Nussbaum, seorang filsuf kontemporer, mengembangkan pendekatan berbasis kemampuan (capabilities) dalam teori keadilan yang menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang egaliter melalui pemenuhan kebutuhan dasar individu dan pemberian kebebasan yang setara untuk setiap orang dalam mengembangkan potensi mereka. Dalam karyanya yang paling terkenal, *Creating Capabilities*, Nussbaum mengajukan teori keadilan yang berfokus pada apa yang dapat dilakukan oleh individu dengan kebebasan yang mereka miliki, bukan hanya pada pembagian sumber daya atau distribusi kekayaan secara merata. Pendekatan ini berbeda dari teori keadilan distributif tradisional yang lebih fokus pada redistribusi kekayaan dan sumber daya (Martha C. Nussbaum, 2011).

Menurut Nussbaum, untuk mencapai kesetaraan yang sejati, kita harus memperhatikan kemampuan setiap individu untuk menjalani hidup yang mereka nilai bermakna. Dalam hal ini, kemampuan bukan hanya soal memiliki barang material, tetapi lebih pada kesempatan untuk berkembang dalam berbagai dimensi kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, partisipasi politik, serta hubungan sosial yang setara dan bebas dari diskriminasi. Nussbaum berargumen bahwa keadilan tidak hanya tentang memberi setiap orang sumber daya yang sama, tetapi tentang memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang mereka anggap penting untuk kehidupan mereka (Martha C. Nussbaum, 2011).

Pendekatan berbasis kemampuan Nussbaum berfokus pada sejumlah kemampuan dasar yang harus dipenuhi untuk setiap individu agar mereka dapat hidup dengan martabat dan kebebasan. Beberapa kemampuan dasar ini meliputi: kemampuan untuk hidup sehat, untuk belajar, untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, untuk memiliki hubungan yang penuh kasih, dan untuk mengakses pekerjaan yang layak. Nussbaum menekankan bahwa setiap orang, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka, berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan ini dan mencapai tujuan-tujuan hidup mereka (Martha C. Nussbaum, 2011).

Dalam pandangan Nussbaum, sebuah masyarakat yang egaliter harus memastikan bahwa ketidaksetaraan dalam kesempatan hidup dapat diminimalkan dengan memberi setiap orang akses yang setara terhadap peluang-peluang yang memungkinkan mereka untuk berkembang. Dia menyarankan bahwa kebijakan publik harus fokus pada pemberdayaan individu dengan mengurangi hambatan yang dihadapi oleh mereka yang terpinggirkan, seperti perempuan, kelompok ras minoritas, atau orang-orang dengan disabilitas. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya dicapai dengan memberikan semua orang jumlah sumber daya yang sama, tetapi dengan memastikan bahwa setiap orang memiliki peluang yang setara untuk mencapai kapasitas mereka yang paling tinggi (Martha C. Nussbaum, 2011).

Nussbaum juga mengkritik pandangan utilitarian yang hanya menilai keadilan berdasarkan total kebahagiaan atau kesejahteraan dalam masyarakat. Menurutnya, utilitarianisme seringkali mengabaikan pentingnya hak-hak individu dan kebebasan mereka untuk membuat pilihan hidup. Sebaliknya, pendekatan berbasis kemampuan mengakui bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dan keinginan yang unik, yang hanya dapat dipenuhi jika mereka memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam cara yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi mereka (Martha C. Nussbaum, 2011).

Secara keseluruhan, pendekatan berbasis kemampuan Martha Nussbaum memberikan kerangka kerja yang lebih inklusif dan

humanis untuk memahami keadilan sosial. Dengan mengutamakan kemampuan individu untuk hidup dengan martabat dan kebebasan, teori Nussbaum tidak hanya berfokus pada pembagian sumber daya, tetapi juga pada penciptaan kondisi sosial yang memungkinkan semua orang untuk berkembang secara maksimal, tanpa hambatan atau diskriminasi. Dalam masyarakat yang egaliter menurut Nussbaum, setiap individu diharapkan dapat mengejar kehidupan yang mereka anggap baik dan bermakna, dengan peluang yang setara untuk mengembangkan potensi mereka.

Dalam Relasi Egaliter terdapat teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial adalah sebuah konsep yang sangat berpengaruh dalam pemikiran politik dan filsafat sosial. Teori ini berusaha menjelaskan bagaimana relasi antara individu dan masyarakat dapat dibangun secara adil dan setara. Pada intinya, teori kontrak sosial menyatakan bahwa hubungan antara individu dan negara atau masyarakat harus berdasarkan pada kesepakatan yang sah, yang dipilih secara bebas oleh semua pihak, dengan tujuan untuk menciptakan suatu tatanan yang adil dan seimbang bagi semua orang. Dalam konteks relasi egalitarian, teori ini sangat relevan karena menekankan pada kesetaraan hak dan kewajiban setiap individu dalam suatu masyarakat.

Kesetaraan merupakan elemen yang sangat penting dalam teori kontrak sosial, terutama dalam perspektif relasi egalitarian, yang berarti bahwa semua individu, tanpa kecuali, harus memiliki

hak yang setara dalam hal kebebasan pribadi, kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik, dan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka; oleh karena itu, struktur sosial yang dibentuk berdasarkan kontrak sosial harus mengutamakan keadilan distributif, di mana kekayaan, kekuasaan, dan kesempatan dibagi secara adil dan merata. John Locke, misalnya, menekankan bahwa setiap individu memiliki hak alami terhadap kehidupan, kebebasan, dan properti, yang dalam pandangannya, negara ada untuk melindungi hak-hak ini, sehingga kontrak sosial dalam kerangka Locke berarti bahwa individu-individu setuju untuk membentuk pemerintah yang sah berdasarkan persetujuan mereka, yang bertujuan untuk menjaga hak-hak ini, sekaligus memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan adil dan setara, dan dalam hal ini, negara atau pemerintah tidak boleh memperlakukan individu secara diskriminatif atau memberlakukan hukum yang menguntungkan sebagian pihak saja (Daya Negri Wijaya, 2016).

Salah satu aspek penting dari kontrak sosial adalah soal legitimasi kekuasaan, yang dalam suatu masyarakat yang egaliter, kekuasaan haruslah berasal dari persetujuan rakyat dan tidak boleh digunakan untuk menguntungkan kelompok tertentu, karena konsep ini menekankan bahwa setiap orang dalam masyarakat memiliki hak yang setara untuk ikut serta dalam pembentukan hukum dan kebijakan, sehingga pemerintah yang sah adalah pemerintah yang

didirikan atas dasar persetujuan bersama, bukan hasil dari pemaksaan atau dominasi satu kelompok atas kelompok lain. Dalam konteks ini, relasi egalitarian dapat dicapai jika kekuasaan politik dan sosial tidak terkonsentrasi pada satu individu atau kelompok tertentu, tetapi tersebar merata dan setiap warga negara diberikan hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan demokrasi, dalam arti yang paling mendalam, adalah bentuk penerapan kontrak sosial yang egaliter, di mana setiap orang memiliki suara yang sama dalam memilih pemimpin dan menentukan kebijakan negara. Meskipun teori kontrak sosial menawarkan gambaran tentang relasi yang adil dan egaliter, penerapannya dalam kenyataan sering kali menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah kritik bahwa kontrak sosial yang dibayangkan oleh para filsuf seperti Rousseau atau Locke sering kali tidak mencerminkan kenyataan sosial yang ada, karena banyak masyarakat, terutama yang terpinggirkan, tidak merasa bahwa mereka benar-benar memiliki suara dalam proses politik atau bahwa mereka menikmati hak yang setara dalam praktiknya (Daya Negri Wijaya, 2016). Misalnya, dalam banyak kasus, kelompok minoritas atau mereka yang berada dalam posisi ekonomi yang lebih rendah sering kali tidak memiliki akses yang sama dalam pengambilan keputusan atau sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup sejahtera, sehingga ketimpangan sosial yang meluas baik itu berdasarkan kelas, ras, atau gender dapat menghalangi tercapainya relasi egaliter

yang ideal sebagaimana digambarkan dalam teori kontrak sosial, dan dalam pengertian ini, kontrak sosial sering kali dikritik sebagai suatu konstruksi yang hanya berlaku bagi kelompok mayoritas atau mereka yang berada dalam posisi kekuasaan.

Dasar Pemikiran Teori kontrak sosial muncul pada abad ke-17 dan ke-18, dengan pemikir-pemikir besar seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangannya. Meskipun mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai kondisi awal (state of nature) dan tujuan akhir kontrak sosial, ketiga pemikir ini sepakat bahwa suatu hubungan sosial yang sah harus dibangun atas dasar kesepakatan antara individu-individu yang bebas dan setara. Pada dasarnya, teori ini mengusulkan bahwa, dalam kondisi "alami" atau tanpa adanya otoritas negara, individu-individu akan hidup dalam kebebasan mutlak. Namun, kebebasan tanpa batas ini dapat menyebabkan konflik dan ketidakpastian, karena setiap orang akan bertindak sesuai dengan keinginan pribadinya. Oleh karena itu, untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan bersama, individu-individu setuju untuk membentuk suatu sistem hukum dan pemerintahan berdasarkan kesepakatan Bersama (Daya Negri Wijaya, 2016).

Dalam konteks relasi egalitarian, kontrak sosial mengutamakan ide bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif yang

membentuk aturan sosial. Tidak ada individu atau kelompok yang memiliki hak istimewa atau dominasi atas yang lainnya, karena semua orang dianggap setara dalam menentukan aturan yang mengatur kehidupan bersama. Konsep egalitarian ini tercermin dalam pemikiran Rousseau, yang dengan tegas menentang adanya ketimpangan atau hierarki yang mengurangi kesetaraan antarindividu dalam masyarakat (Rousseau, 2007).

Rousseau, dalam karya terkenalnya *Du Contrat Social* (Perjanjian Sosial), mengemukakan gagasan bahwa "manusia dilahirkan bebas, namun di mana-mana ia berada dalam belenggu." Ia berargumen bahwa masyarakat yang baik adalah masyarakat yang dibentuk oleh kesepakatan sosial yang didasarkan pada kehendak umum (*volonté générale*), yaitu kehendak kolektif yang mencerminkan kepentingan bersama seluruh anggota masyarakat. Dalam masyarakat yang demikian, semua individu, terlepas dari latar belakang sosial atau kekayaan, memiliki suara yang sama dalam menentukan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Rousseau, 2007).

Sedangkan Kesetaraan merupakan elemen yang sangat penting dalam teori kontrak sosial, terutama dalam perspektif relasi egalitarian. Konsep ini berarti bahwa semua individu, tanpa kecuali, harus memiliki hak yang setara dalam hal kebebasan pribadi, kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik, dan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan

dasar mereka. Oleh karena itu, struktur sosial yang dibentuk berdasarkan kontrak sosial harus mengutamakan keadilan distributif, di mana kekayaan, kekuasaan, dan kesempatan dibagi secara adil dan merata (Daya Negri Wijaya, 2016).

John Locke, misalnya, menekankan bahwa setiap individu memiliki hak alami terhadap kehidupan, kebebasan, dan properti. Dalam pandangannya, negara ada untuk melindungi hak-hak ini. Kontrak sosial dalam kerangka Locke berarti bahwa individu-individu setuju untuk membentuk pemerintah yang sah berdasarkan persetujuan mereka, yang bertujuan untuk menjaga hak-hak ini, sekaligus memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan adil dan setara. Dalam hal ini, negara atau pemerintah tidak boleh memperlakukan individu secara diskriminatif atau memberlakukan hukum yang menguntungkan sebagian pihak saja (Daya Negri Wijaya, 2016).

Peran Legitimasi dalam kekuasaan merupakan salah satu aspek penting dari kontrak sosial adalah soal legitimasi kekuasaan. Dalam suatu masyarakat yang egaliter, kekuasaan haruslah berasal dari persetujuan rakyat dan tidak boleh digunakan untuk menguntungkan kelompok tertentu. Konsep ini menekankan bahwa setiap orang dalam masyarakat memiliki hak yang setara untuk ikut serta dalam pembentukan hukum dan kebijakan. Pemerintah yang sah adalah pemerintah yang didirikan atas dasar persetujuan bersama, bukan hasil dari pemaksaan atau dominasi satu kelompok

atas kelompok lain. Dalam konteks ini, relasi egalitarian dapat dicapai jika kekuasaan politik dan sosial tidak terkonsentrasi pada satu individu atau kelompok tertentu, tetapi tersebar merata dan setiap warga negara diberikan hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Demokrasi, dalam arti yang paling mendalam, adalah bentuk penerapan kontrak sosial yang egaliter, di mana setiap orang memiliki suara yang sama dalam memilih pemimpin dan menentukan kebijakan negara (Susi Iswanti & Zulkarnaini, 2022).

Meskipun teori kontrak sosial menawarkan gambaran tentang relasi yang adil dan egaliter, penerapannya dalam kenyataan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kritik utama adalah bahwa kontrak sosial yang dibayangkan oleh para filsuf seperti Rousseau atau Locke sering kali tidak mencerminkan kenyataan sosial yang ada. Banyak masyarakat, terutama yang terpinggirkan, tidak merasa bahwa mereka benar-benar memiliki suara dalam proses politik atau bahwa mereka menikmati hak yang setara dalam praktiknya (Daya Negri Wijaya, 2016).

Misalnya, dalam banyak kasus, kelompok minoritas atau mereka yang berada dalam posisi ekonomi yang lebih rendah sering kali tidak memiliki akses yang sama dalam pengambilan keputusan atau sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup sejahtera. Ketimpangan sosial yang meluas baik itu berdasarkan kelas, ras, atau gender dapat menghalangi tercapainya relasi egaliter yang ideal

sebagaimana digambarkan dalam teori kontrak sosial. Dalam pengertian ini, kontrak sosial sering kali dikritik sebagai suatu konstruksi yang hanya berlaku bagi kelompok mayoritas atau mereka yang berada dalam posisi kekuasaan (Daya Negri Wijaya, 2016).

3. Relasi Konflikual

Teori relasi konflikual (conflict theory) adalah pendekatan dalam sosiologi yang menekankan ketegangan dan konflik yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat dari perbedaan kepentingan antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Teori ini berpendapat bahwa konflik bukanlah fenomena yang tidak diinginkan atau abnormal, melainkan merupakan bagian dari struktur sosial yang dapat menjelaskan dinamika dan perubahan sosial. Relasi konflikual, menurut teori ini, muncul ketika individu atau kelompok berjuang untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, seperti kekuasaan, kekayaan, atau pengaruh. Beberapa ahli memberikan pandangan terkait relasi konflik sebagai berikut.

Karl Marx adalah salah satu tokoh utama yang mengembangkan teori konflik. Dalam pandangannya, konflik sosial timbul akibat perbedaan kelas sosial, khususnya antara kelas pekerja (proletariat) dan kelas pemilik modal (bourgeoisie). Marx berpendapat bahwa ketimpangan ekonomi yang ada di masyarakat kapitalis menyebabkan ketegangan dan perjuangan antara dua kelas

ini. Menurutnya, konflik ini akan berujung pada perubahan sosial yang radikal (Marx, Karl, Engels, 1848)

Sedangkan Max Weber mengembangkan pandangan yang lebih kompleks tentang konflik sosial, dengan mengakui adanya lebih dari satu sumber ketegangan dalam masyarakat. Selain kelas ekonomi, Weber juga memperkenalkan konsep status sosial dan kekuasaan sebagai faktor yang memengaruhi konflik. Weber melihat konflik bisa terjadi antara kelompok berdasarkan status sosial, etnisitas, atau kekuasaan politik (Weber, 1946).

Ralf Dahrendorf juga mengembangkan teori konflik berdasarkan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Ia berpendapat bahwa konflik sosial selalu terjadi ketika ada ketegangan antara kelompok yang memegang kekuasaan dan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan. Dahrendorf berfokus pada dinamika konflik dalam sistem hierarkis dan organisasi (Dahrendorf, 1959).

Sedangkan Lewis Coser mengembangkan teori konflik fungsionalis yang menyatakan bahwa konflik sosial, meskipun terlihat merusak, dapat memiliki fungsi positif dalam masyarakat. Coser berpendapat bahwa konflik dapat berfungsi untuk mengidentifikasi masalah dalam struktur sosial dan membantu perubahan sosial. Ia melihat konflik sebagai proses yang dapat memperkuat solidaritas dalam kelompok tertentu (Coser, 1956).

Menurut Georg Simmel memandang konflik sebagai bagian dari hubungan sosial yang bisa mempererat atau memperburuk hubungan

antar individu. Menurutnya, konflik bisa terjadi dalam berbagai bentuk, dari perbedaan individu hingga ketegangan antar kelompok besar. Simmel melihat bahwa meskipun konflik merusak, ia bisa mempercepat perubahan sosial atau integrasi sosial dalam Masyarakat (Simmel, 1908)

C. Wright Mills juga mengembangkan teori konflik dengan fokus pada kekuasaan dan elit dalam masyarakat. Ia berpendapat bahwa ketimpangan kekuasaan antara kelompok elit dan masyarakat biasa menciptakan konflik yang dapat menumbuhkan ketidakadilan sosial. Mills menyoroti pentingnya analisis terhadap kekuasaan sebagai inti dari konflik sosial (C. W. Mills.)

Secara keseluruhan, teori relasi konflikual mengajukan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi adalah pendorong utama konflik dalam masyarakat, dan bahwa perubahan sosial yang signifikan sering kali terjadi sebagai akibat dari ketegangan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda.

Teori konflikual dalam konteks pengelolaan objek wisata di tingkat desa, khususnya yang melibatkan kelompok sadar wisata, dapat dilihat sebagai suatu kerangka yang menggambarkan ketegangan dan konflik yang mungkin muncul antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda dalam pengelolaan sumber daya wisata. Kelompok sadar wisata (pokdarwis) sering kali berperan penting dalam mengelola objek wisata, namun mereka tidak beroperasi dalam ruang yang bebas dari konflik. Dalam hal ini, teori

konflikual memberikan perspektif bahwa ketegangan antara kelompok-kelompok yang terlibat, baik itu pemerintah desa, masyarakat lokal, maupun kelompok sadar wisata, dapat menciptakan dinamika yang mempengaruhi pengelolaan objek wisata tersebut (Wibowo et al., 2020).

Pemerintah desa biasanya memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan dan mengatur penggunaan lahan, serta mengatur berbagai aspek administratif terkait objek wisata. Di sisi lain, kelompok sadar wisata, yang sering terdiri dari warga desa yang peduli dengan pengelolaan objek wisata, mungkin memiliki visi dan tujuan yang berbeda dalam mengelola potensi wisata yang ada. Kelompok ini berupaya untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial dari objek wisata, dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal. Namun, sering kali terjadi ketegangan antara pemerintah desa yang mungkin lebih berfokus pada penerimaan ekonomi jangka pendek dan kelompok sadar wisata yang lebih menekankan pada kelestarian jangka panjang.

Konflik dapat muncul, misalnya, terkait dengan alokasi sumber daya, penggunaan anggaran, atau keputusan terkait pengembangan infrastruktur wisata. Pemerintah desa mungkin mendukung pembangunan besar-besaran yang dianggap dapat mendatangkan lebih banyak wisatawan dan pendapatan, sementara kelompok sadar wisata mungkin khawatir bahwa perubahan besar-

besaran ini akan merusak keaslian budaya atau lingkungan sekitar. Kelompok sadar wisata sering kali menuntut agar pengelolaan objek wisata dilakukan secara lebih inklusif, melibatkan masyarakat lokal secara aktif, dan memprioritaskan keberlanjutan daripada sekadar keuntungan ekonomi (Fadhilah Helmi, 2024).

Selain itu, konflik juga bisa muncul dalam hal pembagian keuntungan. Meskipun objek wisata dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan, sering kali ada ketidaksetaraan dalam pembagian hasil antara pemerintah desa dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata. Kelompok sadar wisata bisa merasakan ketidakadilan dalam hal distribusi keuntungan atau kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Ketegangan semacam ini menciptakan perbedaan pendapat dan perjuangan antara pihak yang lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi dan pihak yang lebih mengutamakan kelestarian sosial dan budaya (Handoko, 2018)

Teori konflikual membantu menjelaskan bahwa pengelolaan objek wisata di tingkat desa bukan hanya masalah koordinasi dan kerja sama, tetapi juga melibatkan pertarungan kekuasaan antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam konteks ini, kelompok sadar wisata sering kali berperan sebagai agen perubahan yang berusaha menuntut perhatian terhadap aspek-aspek sosial dan lingkungan dalam pengelolaan wisata, yang seringkali berbenturan dengan kepentingan ekonomi atau politik pemerintah desa (Wibowo et al., 2020).

Untuk mengatasi konflik ini, penting bagi semua pihak untuk terlibat dalam dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi negosiasi yang konstruktif, di mana semua kelompok dapat menyuarakan kepentingannya. Pendekatan berbasis partisipasi yang inklusif, di mana pemerintah desa dan kelompok sadar wisata bekerja bersama-sama dalam merencanakan dan mengelola objek wisata, dapat membantu meminimalkan ketegangan dan mendorong terciptanya pengelolaan wisata yang lebih berkelanjutan dan adil (Fadhilah Helmi, 2024).

4. Relasi Konstruktif

Relasi konstruktif merujuk pada hubungan yang dibangun melalui interaksi yang saling mendukung dan memfasilitasi perkembangan positif antara individu atau kelompok. Dalam konteks sosial dan psikologi, relasi konstruktif mengacu pada interaksi yang membantu menciptakan pemahaman, kesepakatan, dan solusi yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Relasi ini tidak hanya memperhatikan kebutuhan atau kepentingan satu pihak, tetapi juga berfokus pada kolaborasi yang saling menguntungkan dan membangun harmoni dalam hubungan (Baumeister, R. F., & Leary, M. R. 1995).

Konsep relasi konstruktif berasal dari gagasan bahwa interaksi manusia dapat membentuk hasil yang positif dan produktif, baik dalam konteks pribadi, sosial, maupun profesional. Relasi

konstruktif melibatkan komunikasi yang jujur, pengertian yang mendalam terhadap perbedaan, serta kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hubungan konstruktif, pihak-pihak yang terlibat cenderung mendengarkan dengan empati, menghargai perspektif orang lain, dan bekerja sama untuk menciptakan solusi yang bermanfaat bagi semua.

Di tingkat sosial, relasi konstruktif juga terlihat dalam interaksi antar kelompok yang berbeda, seperti dalam dialog antar budaya atau antar kelompok yang memiliki perbedaan pandangan politik. Dengan membangun relasi konstruktif, kelompok-kelompok ini dapat mengurangi ketegangan, membuka ruang untuk pemahaman yang lebih baik, dan bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis.

Dalam konteks pengelolaan objek wisata, teori konstruktivisme membantu memahami bagaimana pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan destinasi wisata berkembang melalui interaksi sosial dan pengalaman bersama. Relasi konstruktif yang terbentuk antara pemerintah desa, masyarakat, dan wisatawan memungkinkan terciptanya pengelolaan objek wisata yang lebih inklusif, berbasis pada prinsip keberlanjutan, dan saling menguntungkan. Pemerintah desa, sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat, memainkan peran kunci dalam menghubungkan berbagai pihak yang terlibat dan memastikan bahwa pengelolaan

objek wisata mengutamakan kepentingan Bersama (Nurdiansyah Dino Alfian, 2024).

Pemerintah desa tidak hanya bertugas sebagai pengelola administrasi, tetapi juga sebagai mediator yang membangun hubungan yang konstruktif dengan masyarakat, wisatawan, dan sektor terkait lainnya. Agar pengelolaan objek wisata berjalan optimal, penting untuk membangun komunikasi yang terbuka, mengutamakan saling pengertian, dan melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan. Ini memungkinkan terciptanya sistem pengelolaan yang efektif, yang tidak hanya memajukan sektor pariwisata, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan ekonomi (Nurdiansyah Dino Alfian, 2024).

Dalam teori konstruktivisme, pengetahuan berkembang melalui interaksi sosial dan pengalaman, yang juga berlaku dalam pengelolaan objek wisata. Pemerintah desa bersama masyarakat lokal harus aktif berdialog, berbagi pengetahuan, dan menyusun rencana pengelolaan yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini tidak hanya membantu menghormati budaya lokal, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam menciptakan dampak positif terhadap perekonomian desa. Selain itu, interaksi dengan wisatawan yang memiliki berbagai pengalaman juga dapat memperkaya pemahaman pemerintah desa tentang cara terbaik

untuk mengelola destinasi wisata secara berkelanjutan (Baumeister, R. F., & Leary, M. R. 1995).

Pentingnya peran masyarakat lokal dalam pengelolaan objek wisata sangat besar, karena mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi, budaya, dan sumber daya alam setempat yang sangat bernilai bagi pengembangan destinasi wisata. Untuk itu, pemerintah desa perlu melibatkan mereka dalam setiap tahap pengelolaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun forum atau kelompok kerja yang melibatkan warga desa, pengusaha lokal, dan pemerintah desa. Forum ini memungkinkan semua pihak untuk merencanakan dan mengimplementasikan strategi pengelolaan yang menguntungkan bersama, serta memastikan manfaat ekonomi dari objek wisata tersebar merata di seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, dengan pelatihan dan pembekalan pengetahuan mengenai manajemen pariwisata, masyarakat lokal akan lebih mampu mengelola dan merawat objek wisata secara berkelanjutan. Konsep "zona perkembangan proksimal" yang dijelaskan oleh Vygotsky dalam teori konstruktivisme juga relevan di sini, di mana masyarakat, dengan bantuan pemerintah desa dan pihak terkait lainnya, dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola objek wisata dengan lebih baik.

Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam pengembangan objek wisata juga

sangat diperlukan. Pemerintah desa harus memastikan bahwa kolaborasi ini tidak mengorbankan keberlanjutan budaya dan lingkungan lokal. Pengembangan infrastruktur wisata, seperti jalan atau fasilitas umum, harus direncanakan dengan hati-hati agar tidak merusak ekosistem atau kualitas hidup masyarakat. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam memfasilitasi dialog antara berbagai pihak untuk memastikan pengembangan objek wisata tetap sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati bersama.

Keberlanjutan adalah aspek krusial dalam pengelolaan objek wisata. Tidak hanya terkait dengan aspek lingkungan, keberlanjutan juga mencakup keberlanjutan sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa. Dalam hal ini, pemerintah desa perlu merancang sistem pengelolaan yang menjamin bahwa objek wisata tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga memberi manfaat jangka panjang. Melalui relasi konstruktif yang inklusif, pemerintah desa dapat menciptakan kebijakan yang menjaga keseimbangan antara pengembangan objek wisata dan pelestarian budaya serta lingkungan hidup, seperti pengelolaan sampah dan konservasi sumber daya alam. Keberlanjutan ini juga tercapai dengan melibatkan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian objek wisata, menjadikannya bagian dari usaha bersama yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Nurdiansyah Dino Alfian, 2024).

Secara keseluruhan, relasi konstruktif adalah pendekatan yang lebih berfokus pada pemecahan masalah secara kolaboratif, daripada mengedepankan konflik atau persaingan. Dalam relasi konstruktif, setiap individu atau kelompok berperan sebagai pembangun hubungan yang positif dan saling mendukung, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik, lebih adil, dan lebih berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Relasi konstruktif dalam pengelolaan objek wisata oleh pemerintah desa mengandalkan interaksi dan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat lokal, sektor swasta, dan wisatawan. Melalui pembelajaran sosial dan pengalaman yang dibangun bersama, pengelolaan objek wisata dapat menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak. Pemerintah desa, sebagai fasilitator utama, harus memastikan bahwa semua pemangku kepentingan dapat berbagi pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan bekerja sama untuk menciptakan destinasi wisata yang tidak hanya menarik, tetapi juga berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan (Nurdiansyah Dino Alfian, 2024).

Proses konstruktif ini tidak hanya mengarah pada pengelolaan objek wisata yang lebih baik, tetapi juga berpotensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, memberikan peluang ekonomi baru, dan melestarikan warisan budaya serta lingkungan. Dengan membangun relasi yang konstruktif,

pengelolaan objek wisata di desa dapat bertransformasi menjadi model pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang digunakan secara menyeluruh untuk dapat menghasilkan penelitian yang tepat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk menyelidiki objek penelitian yang bersifat alami. Berbeda dengan eksperimen, dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan triangulasi (gabungan). Analisis data dilakukan secara induktif/kualitatif, dengan fokus pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2017).

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah proses eksplorasi yang bertujuan untuk memahami perilaku individu atau kelompok serta menggambarkan masalah sosial atau kemanusiaan. Proses ini dimulai dengan merumuskan pertanyaan penelitian dan prosedur yang bersifat sementara, mengumpulkan data melalui pengaturan partisipan, melakukan analisis data secara induktif, serta menyusun data yang terfragmentasi menjadi tema-tema yang relevan, kemudian

memberikan interpretasi makna terhadap data yang diperoleh (Creswell dalam Sugiyono, 2017).

2. Unit Analisis Data

a. Objek Penelitian

Penelitian ini ingin menemukan Relasi Pemerintah Kalurahan Guwosari Dengan Kelompok Sadar Wisata Dalam Mengelola ObjekWisata Goa Selarong. Maka dari itu, lewat penelitian ini, peneliti ingin mencari tahu terkait Interaksi antara Pemerintah Kalurahan Guwosari dengan Kelompok Kelompok Sadar Wisata dalam mengelola Objekwisata Goa Selarong dengan menggunakan konsep governance sebagaimana yang diajarkan dalam Mazab Timoho.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian sering juga disebut dengan informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang kondisi dan situasi latar penelitian. Dalam penelitian ini, penentuan informasi dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah penentuan informasi didasarkan pada tujuan tertentu yang mengetahui relasi antara Pemerintah Kalurahan Guwosari dan Kelompok Wanita Tani Sumber Rejeki dalam mewujudkan ketersediaan pangan di Kalurahan Guwosari Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Informan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang merupakan sumber informasi yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi kondisi latar penelitian (sugiyono, 2018)

Dalam penelitian ini, informan yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah orang-orang yang merupakan sumber informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi kondisi latar penelitian. Inform dalam penelitian ini berjumlah 12 orang.

Pemilihan 12 orang informan dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan peran langsung dalam konteks yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada relasi antara pemerintah Kalurahan Guwosari dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengelolaan objek wisata, sehingga diperlukan informan yang benar-benar memahami dinamika internal, proses pengambilan keputusan, serta implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Dari pihak pemerintah kalurahan, dipilih tiga orang pejabat utama, yaitu Lurah, Carik (sekretaris desa), dan Ulu-uluh. Ketiga tokoh ini memiliki posisi strategis dalam struktur pemerintahan desa dan terlibat langsung dalam perumusan

serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah, termasuk sektor pariwisata. Lurah sebagai pimpinan tertinggi kalurahan berperan dalam pengambilan keputusan dan pembentukan arah kebijakan. Carik bertanggung jawab dalam aspek administratif, komunikasi antarlembaga, dan dokumentasi kebijakan, sementara Ulu-ulu berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang menjadi bagian integral dari destinasi wisata desa.

Selanjutnya, dari unsur Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), dipilih dua informan, yaitu ketua dan sekretaris. Bamuskal merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislatif dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah kalurahan. Kehadiran mereka dalam penelitian ini penting untuk memahami bagaimana proses musyawarah, pengawasan, dan akuntabilitas dalam perencanaan serta pengelolaan objek wisata dijalankan. Peran Bamuskal juga mencerminkan representasi suara masyarakat dalam penyusunan program-program pariwisata desa.

Dari pihak Pokdarwis, dipilih tujuh orang pengurus aktif yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa koordinator bidang. Pemilihan pengurus Pokdarwis sebagai informan utama dari unsur masyarakat didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka merupakan pelaksana langsung kegiatan pengelolaan wisata, memiliki pengetahuan

mendalam mengenai kondisi lapangan, serta menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat lokal dan pemerintah desa. Mereka juga terlibat dalam perencanaan, promosi, hingga evaluasi kegiatan wisata di desa, sehingga pandangan mereka sangat penting untuk menangkap dinamika kolaborasi maupun ketegangan yang terjadi dalam relasi antaraktor.

Dengan melibatkan unsur utama pemerintah kalurahan dan Pokdarwis, penelitian ini dapat menggali data secara komprehensif dari berbagai perspektif, baik dari sisi otoritas pembuat kebijakan, lembaga pengawas, maupun pelaksana lapangan. Komposisi informan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan kelembagaan, proses kolaborasi, pembagian peran, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan objek wisata berbasis masyarakat di Kalurahan Guwosari

Berikut adalah tabel informan penelitian

Table 1. Tabel Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Masduki Rahmad, S.IP	Lurah
2	Umarwanto	Ulu-ulu
3	Nur Hidayat, S.E	Carik
4	Bapak Surdi	Pengurus Pokdarwis Dewis Sari
5	Ibu Ratih	Pengurus Pokdarwis Dewis Sari
6	Bapak Tuci	Pengurus Pokdarwis Dewis Sari
7	Bapak Jumino	Masyarakat
8	Bapak Jiyo	Masyarakat

9	Bapak Darmanto	Pengurus Pokdarwis Dewis Sari
10	Muhaimin, S.Th.I., M.H	Ketua Bamuskal
11	Ibu Sumiati	Masyarakat
12	Nur Kholsi	Sekretaris Bamuskal

Sumber: Dokumen Lapangan Peneliti 2025

Dalam penelitian ini, peneliti memilih sebanyak 12 informan yang berasal dari berbagai pihak yang memiliki peran dan keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan objek wisata Goa Selarong. Pemilihan informan ini didasarkan pada prinsip purposive sampling, yakni memilih individu yang dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, dan otoritas yang relevan dengan topik penelitian, yaitu tentang relasi antar aktor dalam pengelolaan destinasi wisata.

Pertama, dari unsur pemerintah desa, peneliti mewawancara tiga tokoh penting: lurah, carik, dan ulu-ulu. Ketiganya dipilih karena memiliki peran struktural dalam pemerintahan desa dan keterlibatan strategis dalam kebijakan pengelolaan wilayah, termasuk destinasi wisata. Lurah sebagai kepala desa memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan, carik berperan dalam aspek administrasi dan dokumentasi, sedangkan ulu-ulu terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya air, yang penting dalam konteks pengelolaan lingkungan wisata.

Kedua, dari unsur Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), peneliti memilih ketua Bamuskal sebagai

informan. Posisi ini dipilih karena memiliki fungsi legislatif desa dan peran sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Keterlibatannya penting untuk memahami bagaimana kebijakan pengelolaan wisata dirumuskan secara partisipatif antara pemerintah desa dan masyarakat.

Ketiga, dari unsur Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), peneliti memilih lima orang pengurus inti yang aktif dalam operasional pengelolaan objek wisata. Kelima pengurus ini dipilih karena mereka merupakan pelaksana langsung berbagai program wisata, mulai dari pelayanan pengunjung, promosi, hingga pelestarian lingkungan. Informasi dari mereka sangat penting untuk memahami dinamika relasi kerja, peran, dan tantangan pengelolaan wisata di lapangan.

Terakhir, dari masyarakat umum, peneliti mewawancarai tiga orang warga yang tinggal di sekitar kawasan Goa Selarong. Pemilihan mereka didasarkan pada keterlibatan atau pengaruh yang mereka rasakan terhadap aktivitas pariwisata, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Wawasan dari masyarakat penting untuk menangkap perspektif akar rumput mengenai dampak dan relasi sosial yang terbentuk melalui pengelolaan wisata.

Kombinasi dari keempat kategori informan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang holistik

dan mendalam tentang relasi yang terbentuk antar aktor dalam pengelolaan Goa Selarong. Dengan demikian, hasil penelitian dapat merepresentasikan dinamika pengelolaan wisata dari berbagai sudut pandang dan tingkat keterlibatan yang berbeda.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Observasi

Dalam observasi ini menggunakan metode pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Pengumpulan data dengan menggunakan alat indera dan diikuti dengan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala/fenomena yang diteliti. Observasi dapat dilakukan bila belum banyak keterangan yang dimiliki tentang masalah yang sedang diteliti. Dari hasil observasi, dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkan masalah yang sedang diteliti.

Menurut (Creswell dalam sugiyono: 2017) observasi ialah ketika peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati secara langsung aktivitas individu-individu di lokasi penelitian

Penelitian ini berfokus pada observasi hubungan antara Pemerintah Kalurahan Guwosari dan Pokdarwis Dewi Sari dalam pengelolaan objek wisata Goa Selarong, khususnya setelah objek wisata tersebut diambil alih oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul. Dalam proses pengamatan, peneliti mencatat dinamika yang terjadi antara Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis pasca-pengambilalihan oleh Dinas Pariwisata, serta bagaimana kedua pihak tersebut beradaptasi dengan perubahan pengelolaan yang lebih terstruktur dan dikelola oleh pihak eksternal.

Setelah pengambilalihan, Pemerintah Kalurahan Guwosari tetap memiliki peran penting dalam pengelolaan Goa Selarong. Walaupun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul kini menjadi pengelola utama, Pemerintah Kalurahan terus berperan sebagai penghubung antara masyarakat lokal dan pihak dinas. Peneliti mencatat bahwa Pemerintah Kalurahan tetap aktif dalam memberikan masukan terkait pelestarian budaya dan lingkungan di sekitar Goa Selarong. Mereka mengadakan pertemuan rutin dengan Pokdarwis untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil sejalan

dengan kepentingan masyarakat setempat serta mempertahankan keberlanjutan budaya dan alam.

Pokdarwis Dewi Sari, sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan objek wisata, juga merasakan dampak positif dari pengambilalihan ini. Meskipun ada perubahan dalam struktur pengelolaan, Pokdarwis merasa lebih terorganisir dan mendapatkan banyak dukungan dari Dinas Pariwisata, termasuk pelatihan dalam pengelolaan objek wisata dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Peneliti mengamati bahwa Pokdarwis Dewi Sari menjalankan peran mereka dengan lebih profesional, dengan tetap menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Kalurahan yang membantu mereka dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan pihak dinas.

Selama proses observasi, peneliti mencatat adanya komunikasi yang sangat terbuka antara Pemerintah Kalurahan, Pokdarwis Dewi Sari, dan Dinas Pariwisata. Kedua belah pihak, yakni pemerintah desa dan Pokdarwis, saling mendukung dan berkolaborasi untuk menciptakan pengelolaan yang lebih terstruktur dan efektif. Dalam beberapa kesempatan, Pemerintah Kalurahan juga bertindak sebagai mediator yang menghubungkan Pokdarwis dengan Dinas Pariwisata untuk memastikan bahwa kepentingan lokal tetap diperhatikan dalam setiap keputusan yang diambil.

Secara keseluruhan, observasi ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan Goa Selarong telah berpindah ke tangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul, relasi antara Pemerintah Kalurahan Guwosari dan Pokdarwis Dewi Sari tetap berjalan konstruktif. Kolaborasi yang terjalin antara kedua pihak menciptakan pengelolaan yang lebih efisien, dengan mempertahankan kearifan lokal dan memperhatikan kelestarian budaya serta lingkungan sekitar Goa Selarong. Proses pengelolaan yang lebih terstruktur ini juga berdampak positif dalam meningkatkan kapasitas Pokdarwis dan memberikan peluang ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih, dengan tujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam makna suatu topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti mengkombinasikan dua jenis wawancara yaitu wawancara mendalam (in depth interview) dan wawancara terarah (Kriyantono, 2020: 290). Wawancara mendalam dilakukan dilakukan dengan cara bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam Sedangkan wawancara terarah peneliti menanyakan kepada informan

terkaitan hal-hal yang sudah disiapkan sebelumnya untuk wawancara.

Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh data/informasi di lokasi penelitian secara langsung berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui tanya jawab, sehingga peneliti dapat melakukan wawancara yang mendalam dengan pihak terkait (informan penelitian) dengan mengacu pada pedoman wawancara atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan peneliti untuk menjadi pijakan dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bukti otentik bagi peneliti dengan menggunakan alat yang dipersiapkan/seadanya untuk mengambil data yang diperlukan secukupnya. Dokumen lain juga adalah dokumen yang berbentuk tulisan misalnya gambaran umum Kalurahan Sambirejo, searahnya yang terdapat dalam profil Kalurahan, kebijakan-kebijakan, serta dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto. Hasil dokumen yang ada kemudian diolah sedemikian rupa, agar dapat melengkapi data yang sudah diperoleh dari metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini dokumentasi merujuk pada fakta-fakta yang tersimpan dalam profil Kalurahan Guwosari dan Profil Kelompok Sadar Wisat dan juga foto bersama informan penelitian pada saat wawancara.

Dalam proses penelitian mengenai objek wisata Goa Selarong, peneliti berhasil mengumpulkan sejumlah dokumen sejarah yang berkaitan dengan situs tersebut. Dokumen-dokumen ini memberikan wawasan mendalam mengenai latar belakang sejarah Goa Selarong, yang sangat penting dalam memahami konteks budaya dan nilai historis yang terkandung di dalamnya.

Salah satu dokumen utama yang ditemukan adalah sejarah singkat Goa Selarong yang menjelaskan asal-usul penamaan dan hubungannya dengan peristiwa sejarah di masa lalu. Dokumen ini menyebutkan bahwa Goa Selarong memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi, terutama dalam kaitannya dengan perjuangan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa (1825-1830). Goa ini dipercaya sebagai salah satu tempat persembunyian dan markas bagi Pangeran Diponegoro dan pasukannya selama masa perjuangan melawan penjajahan Belanda. Keberadaan Goa Selarong sebagai situs bersejarah ini menjadikannya sebagai simbol perlawanan dan semangat kemerdekaan.

Selain itu, peneliti juga menemukan dokumen arsip pemerintahan yang mencatat perkembangan pengelolaan Goa Selarong dari masa ke masa. Dokumen ini menggambarkan bagaimana pengelolaan wisata Goa Selarong dimulai dan berkembang, mulai dari dikelolanya secara lokal oleh masyarakat setempat, hingga akhirnya pada tahun-tahun terakhir dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul. Arsip

ini juga mencatat berbagai kebijakan yang diterapkan dalam upaya pelestarian situs sejarah serta pemeliharaan fasilitas yang ada di sekitar Goa Selarong.

Selain dokumen sejarah dan arsip pemerintahan, peneliti juga memperoleh foto-foto dokumentasi yang menggambarkan Goa Selarong dari berbagai periode waktu. Foto-foto ini memberikan gambaran tentang perubahan yang terjadi, baik dari segi fisik situs maupun pengelolaannya. Foto-foto tersebut turut menggambarkan perkembangan infrastruktur wisata yang semakin terstruktur seiring dengan pengelolaan yang lebih profesional pasca pengambilalihan oleh Dinas Pariwisata

4. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017) analisis data merupakan proses memilih mana yang penting dan yang tidak penting, mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengkoordinasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola hubungan antar kategori, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Sugiyono menekankan bahwa analisis data harus sistematis, baik untuk pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Prosesnya meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan penyesuaian metode sesuai jenis penelitian

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dicatat dalam catatan kemudian di deskripsikan dan direfleksikan (Sugiyono, 2016: 309)

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data secara sistematis untuk menggali informasi terkait Relasi Pemerintah Kalurahan Dengan Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Goa Selarong , dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana proses tersebut, metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung, wawancara dan studi dokumentasi.

Tahap pertama, peneliti melakukan observasi langsung di lapangan, yaitu dengan mengamati kondisi objek penelitian, interaksi antara perangkat desa dan Pokdarwis, serta suasana umum masyarakat terkait pengelolaan objek wisata goa selarong. Peneliti mencatat berbagai temuan yang berkaitan dengan relasi dalam pengelolaan objek wisata goa selarong.

Tahap kedua, peneliti menggunakan metode wawancara dengan informan, yakni dari pihak Pemerintah Kalurahan Guwosari, Pengurus Pokdarwis dan Masyarakat sekitar objek wisata goa selarong. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan semi-terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih fleksibel namun tetap berfokus

pada topik utama, yaitu relasi yang dibangun antara Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis dalam pengelolaan objek wisata goa selarong.

Tahap ketiga, peneliti melakukan studi dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen resmi yang relevan, foto tiket masuk ke objek wisata goa selarong, Payung hukum dalam pengelolaan objek wisata goa selarong serta foto bersama para informan sebagai bukti dokumentasi peneliti di lapangan. mencocokkan antara praktik di lapangan dengan aturan yang seharusnya menjadi pedoman.

Selama proses pengumpulan data, peneliti juga menghadapi beberapa kendala, terutama dalam menjadwalkan wawancara dengan beberapa informan, karena sebagian besar dari mereka memiliki kesibukan yang cukup padat dan sulit ditemui dalam waktu yang ditentukan. Untuk mengatasi hal ini, peneliti menyesuaikan jadwal dan mendatangi informan di waktu-waktu senggang, seperti sore atau malam hari, agar data tetap dapat diperoleh secara maksimal.

Melalui kombinasi ketiga metode tersebut, peneliti berhasil mengumpulkan data yang cukup kaya dan beragam, yang kemudian dijadikan dasar untuk analisis lebih lanjut terkait Relasi Pemerintah Kalurahan Guwosari Dengan Kelompok Sadar Wisa dalam pengelolaan objek wisata.

b. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2019:323) Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan sesuai dengan topik penelitian, dicari tema dan polanya, untuk memberikan deskripsi yang lebih jelas serta mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Dalam proses analisis data, peneliti melakukan tahapan reduksi data untuk menyederhanakan, mengorganisasi, dan memfokuskan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Reduksi data ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menyaring informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian, yaitu bagaimana pola relasi antara Pemerintah Kalurahan Guwosari dan Kelompok Sadar Wisata terbentuk dan dijalankan dalam konteks pengelolaan objek wisata Goa Selarong.

Langkah pertama dalam reduksi data adalah melakukan transkripsi wawancara secara penuh, kemudian mengkategorikan isi wawancara berdasarkan tema-tema utama, seperti keterlibatan Pokdarwis dalam pengambilan keputusan, peran pemerintah kalurahan dalam koordinasi dengan Dinas Pariwisata, serta bentuk distribusi manfaat ekonomi dari kegiatan wisata.

Selanjutnya, peneliti melakukan penyaringan data observasi, dengan menyoroti momen-momen interaksi antara

aktor pemerintah desa dan kelompok sadar wisata yang menunjukkan dinamika kekuasaan, dominasi peran, atau kerja sama yang setara. Data yang bersifat repetitif, tidak relevan dengan fokus relasi antar-aktor, atau menyimpang dari konteks pengelolaan Goa Selarong dieliminasi untuk menjaga fokus analisis.

Dalam studi dokumentasi, peneliti menyeleksi dokumen yang secara langsung menunjukkan struktur kewenangan dan alur koordinasi, seperti surat keputusan, notulen rapat bersama, atau kesepakatan kerja antara Kalurahan dan Dinas Pariwisata. Dokumen yang tidak menunjukkan informasi relasional atau hanya bersifat administratif umum tidak diikutsertakan dalam tahap analisis lanjutan.

Melalui proses reduksi ini, peneliti dapat menyusun matriks tematik yang membantu memetakan bentuk relasi yang terbentuk, baik yang bersifat kolaboratif maupun hegemonik, antara Pemerintah Kalurahan Guwosari dan Pokdarwis. Proses ini menjadi dasar penting dalam membangun interpretasi yang tajam dan relevan terhadap realitas sosial yang diteliti

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan hasil reduksi yang disajikan dalam laporan secara sistematis yang mudah dibaca atau dipahami baik sebagai keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai satu kesatuan (Sugiyono, 2018:249).

Setelah melalui tahap reduksi data, peneliti melanjutkan pada tahap penyajian data sebagai upaya untuk mengorganisasikan dan menyusun informasi yang telah diklasifikasikan secara sistematis. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis dan penarikan kesimpulan akhir yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain narasi deskriptif, matriks tematik, serta kutipan langsung dari informan.

Narasi deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara menyeluruh bagaimana bentuk interaksi dan hubungan yang terjalin antara Pemerintah Kalurahan Guwosari dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengelolaan objek wisata Goa Selarong. Melalui narasi ini, peneliti memaparkan peran masing-masing aktor, pola kerja sama yang dibentuk, serta dinamika kekuasaan yang muncul dalam praktik pengelolaan. Untuk memperjelas keterkaitan antara temuan-temuan lapangan, peneliti juga menyusun matriks tematik yang memuat kategori utama seperti keterlibatan Pokdarwis dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, otoritas dan peran Pemerintah Kalurahan, serta tantangan yang muncul dalam koordinasi antar aktor.

Setiap tema tersebut diperkuat dengan kutipan langsung dari informan kunci, seperti pernyataan dari Pemerintah Kalurahan, Pokdarwis, dan Masyarakat, guna memberikan

validitas serta memperkaya interpretasi terhadap realitas yang terjadi di lapangan. Penyajian data juga disusun berdasarkan kronologi atau konteks peristiwa tertentu, misalnya dalam pelaksanaan pertemuan koordinasi, kegiatan event wisata, hingga proses pembagian hasil usaha pariwisata.

Dengan model penyajian ini, data yang telah dikumpulkan tidak hanya ditampilkan sebagai rangkaian informasi mentah, tetapi juga diolah dengan memberi konteks, makna, dan keterkaitan antarunsur yang ada. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara lebih komprehensif bagaimana struktur relasi dan dinamika kekuasaan terwujud dalam praktik pengelolaan objek wisata Goa Selarong

d. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2015:83) Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan merujuk pada hasil temuan yang diperoleh dari proses wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang sebelumnya telah melalui tahapan reduksi dan penyajian data. Kesimpulan ditarik berdasarkan analisis tematik terhadap dinamika relasi antara Pemerintah Kalurahan Guwosari dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam konteks pengelolaan objek wisata Goa Selarong.

Kesimpulan ditarik dengan mempertimbangkan keterkaitan antartemuan data dan konteks sosial yang melingkupi praktik pengelolaan wisata di tingkat lokal. Dalam hal ini, kesimpulan tidak hanya berfungsi untuk menjawab pertanyaan penelitian, tetapi juga memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana relasi kekuasaan terbentuk, dijalankan, dan dipertahankan dalam pengelolaan Goa Selarong.

Dengan pendekatan tersebut, kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat generalisasi, melainkan merupakan interpretasi mendalam terhadap realitas sosial yang khas, sesuai dengan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Kesimpulan inilah yang kemudian menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dan saran praktis bagi para pemangku kepentingan dalam pengembangan tata kelola pariwisata yang lebih inklusif dan berkeadilan di tingkat desa

BAB II

OBYEK WISATA GOWA SELARONG

A. Sejarah Gowa Selarong

Goa Selarong terletak di kawasan Bukit Selarong, tepatnya di Padukuhan Kauman, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Wisata alam ini berada di kaki bukit yang dikelilingi oleh suasana alami dengan pemandangan hijau dan udara sejuk, menjadikannya sebagai salah satu tujuan wisata yang menarik bagi pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam sekaligus menelusuri sejarah.

Goa Selarong secara administratif terletak di Bukit Selarong, yang berada di Padukuhan Kauman, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul. Tempat ini merupakan lokasi di mana Pangeran Diponegoro pernah tinggal, bersemadi, dan mengumpulkan pengikutnya selama Perang Jawa (1825-1830).

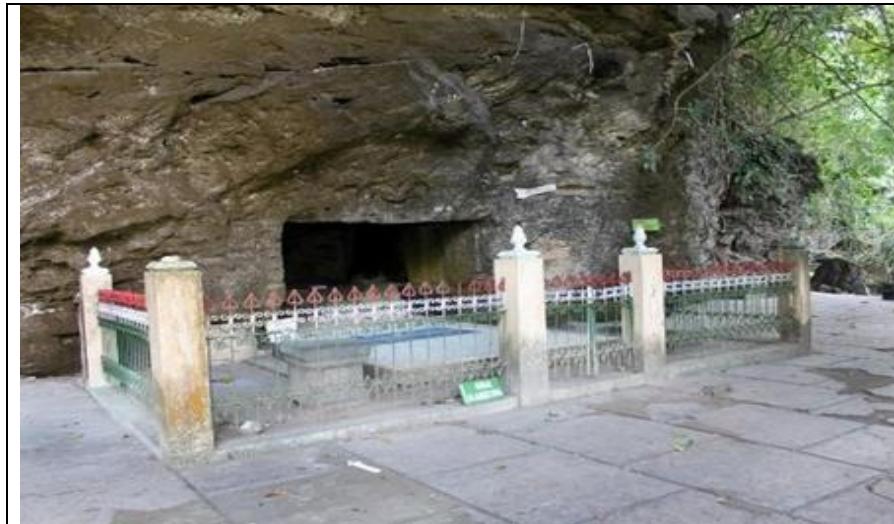
Sejarah Goa Selarong sangat terkait dengan perjuangan Pangeran Diponegoro, tokoh utama dalam Perang Jawa (1825-1830), yang menggunakan gua ini sebagai tempat untuk bersemadi dan mengumpulkan pasukan. Pada masa tersebut, Pangeran Diponegoro menghabiskan waktu di Goa Selarong untuk melakukan tirakat dan merencanakan strategi perang. Goa ini memiliki nilai sejarah yang mendalam, karena di sinilah Pangeran Diponegoro sering kali merenung dan mempersiapkan diri untuk menghadapi peperangan melawan penjajahan Belanda.

Selain itu, Goa Selarong juga dikenal memiliki dua struktur gua yang bersejarah, yaitu Goa Selarong Kakung dan Goa Selarong Putri. Goa Selarong Kakung, yang berada di sebelah barat, diperkirakan sudah ada sejak zaman Hindu sebelum digunakan oleh Pangeran Diponegoro. Di dalam gua ini, terdapat sejumlah pahatan dan altar yang menunjukkan bahwa gua ini pernah digunakan sebagai tempat ibadah oleh pengikut Hindu pada masa lalu. Sementara itu, Goa Selarong Putri terletak sekitar 50 meter di sebelah timur Goa Selarong Kakung dan terbentuk secara alamiah dengan kondisi di dalam gua yang dipenuhi dengan runtuhan batuan kapur dan akar pohon.

Keberadaan Goa Selarong sebagai situs bersejarah dan destinasi wisata alam telah menjadikannya sebagai tempat yang menarik untuk dikunjungi. Selain mempelajari sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro, pengunjung juga dapat menikmati keindahan alam sekitar yang masih terjaga, seperti pohon-pohon besar yang tumbuh di sekitar bukit dan udara yang segar. Goa Selarong menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Indonesia, menjadikannya sebagai destinasi wisata yang tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kekayaan nilai sejarah yang patut untuk dijaga dan dipelajari.

Di kawasan Bukit Goa Selarong, terdapat Struktur Cagar Budaya seperti Goa Selarong Kakung dan Goa Selarong Putri, serta Benda Cagar Budaya berupa yoni dan batu monolit. Kelompok Sadar Wisata

Goa Selarong Kakung



Gambar 2. 1. Gambar Goa Selarong Kakung.

Goa Selarong Kakung dilihat dari arah barat daya (Sumber:
Dokumen Lapangan Peneliti 2025)

Goa Selarong Kakung terletak di sebelah barat Goa Selarong Putri. Goa Selarong Kakung dan Goa Selarong juga dikenal oleh warga dengan nama Goa Secang. Hal ini karena dulunya Bukit Selarong banyak ditumbuhi pohon secang. Gua Selarong Kakung diperkirakan merupakan gua yang telah ada pada zaman Hindu sebelum Pangeran Diponegoro menggunakannya sebagai tempat semadi. Di sinilah Pangeran Diponegoro biasa melewatkkan malam tirakatnya sebelum pagi harinya kembali ke Tegalrejo.

Gua memiliki ukuran: panjang mulut gua 2,64 m, tinggi mulut gua 1,7 m, kedalaman gua 4,03 m, serta tinggi ruang gua 1,85 m. Pada mulut gua terdapat profil yang diperkirakan merupakan kala unfinished. Fitur tersebut tampak pada sebelah kiri mulut gua berupa

dua guratan lis sepanjang 135 cm dengan jarak antar lis 15 cm pada ketinggian 140 cm.

Di sisi timur dan barat dinding gua terdapat pahatan berupa panil dan pilar, sedangkan di bagian utara gua terdapat altar yang juga merupakan hasil pahatan. Panil dan pilar pada dinding timur gua berukuran 227 cm x 107 cm. Sedangkan panil dan pilar pada dinding barat berukuran 272 cm x 103 cm. Altar berukuran 281 cm dengan lebar 98 cm, serta tingginya 109 cm. Panil dan pilar inilah yang mengindikasikan pemanfaatan awal gua sebagai tempat beribadah penganut agama Hindu.

Di depan gua terdapat dua buah yoni yang posisinya terbalik. Bagian depan mulut gua diberi struktur baru berupa pagar tembok dan lantai dari tatanan ubin batu andesit yang dibangun pada tahun 2016.

Goa Selarong Putri



Gambar 2. 2. Gambar Goa Selarong Putri.

Goa Selarong Putri dilihat dari arah barat daya (Sumber: Dokumen Lapangan Peneliti 2025)

Goa Selarong Putri berjarak sekitar 50 m di sebelah timur Goa Selarong Kakung. Posisi gua memanjang dari barat ke timur. Mulut gua menghadap ke arah selatan, berukuran panjang 9,85 m dan tinggi 1,4 m. Kedalaman gua 7,54 m dan ketinggian gua bagian dalam 2,52 m. Keadaan di dalam Goa Selarong Putri berupa runtuhan batuan kapur yang terkikis oleh air dan akar pohon yang menjalar hingga ke dalam gua. Goa Selarong Putri terbentuk secara alamiah.

Saat ini di depan mulut gua terdapat pagar tembok dan lantai dari tatanan batu andesit yang dibentuk seperti ubin. Tebing di atas mulut gua ditumbuhi pohon-pohon yang akarnya menjalar hingga ke dalam gua.

B. Kelompok Sadar Wisata Dewi Sari

Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan sektor pariwisata memerlukan berbagai upaya pemberdayaan (empowerment), sehingga masyarakat dapat berperan secara lebih aktif dan optimal. Dengan demikian, mereka tidak hanya turut serta dalam setiap proses pembangunan, tetapi juga merasakan manfaat positif dari kegiatan tersebut, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka. Agar tujuan ini tercapai, masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk terlibat dalam setiap tahap pembangunan kepariwisataan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan salah satu lembaga yang didirikan oleh warga desa dengan tujuan untuk menggerakkan

masyarakat setempat dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya sektor pariwisata di wilayah mereka. Pokdarwis terdiri dari individu-individu yang memiliki kepedulian tinggi terhadap perkembangan pariwisata serta bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian destinasi wisata, dengan berfokus pada penerapan sapta pesona, yang meliputi: keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, keramahan, kenyamanan, dan kesejahteraan.

Kelompok Sadar Wisata ini berperan penting sebagai mitra pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan implementasi nilai-nilai sapta pesona dalam kegiatan pariwisata di masyarakat. Sebagai lembaga berbasis masyarakat, Pokdarwis memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas destinasi wisata sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi wisatawan. Oleh karena itu, Pokdarwis bukan hanya bertugas menggerakkan masyarakat untuk memahami pentingnya pariwisata, tetapi juga menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Secara umum, fungsi Pokdarwis dalam konteks pembangunan pariwisata meliputi penggerakan sadar wisata dan penerapan prinsip-prinsip sapta pesona di wilayah destinasi wisata. Pokdarwis juga berfungsi sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam mewujudkan dan mengembangkan kesadaran wisata di daerah tersebut. Dengan adanya Pokdarwis, diharapkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kepariwisataan akan meningkat, serta potensi-potensi wisata lokal dapat

dikembangkan secara maksimal, mengarah pada terciptanya destinasi wisata yang lebih berkualitas.

Selain itu, keberadaan Pokdarwis dapat memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan wisata daerah mereka. Hal ini tidak hanya menguntungkan Pokdarwis sebagai lembaga, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, yang dapat merasakan manfaat langsung dari sektor pariwisata yang berkembang. Dengan partisipasi aktif masyarakat, pembangunan pariwisata di daerah tersebut dapat berjalan lebih harmonis dan berkelanjutan.

Pokdarwis merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk mencapai beberapa tujuan penting, antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pariwisata dan dampaknya terhadap kehidupan mereka.
2. Memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan sektor pariwisata, sehingga mereka dapat turut menentukan arah dan bentuk pengembangan pariwisata di daerah mereka.
3. Meningkatkan nilai manfaat yang dapat diperoleh masyarakat atau anggota Pokdarwis dari sektor pariwisata, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya.
4. Mensukseskan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dengan berbagai peran tersebut, Pokdarwis diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menciptakan destinasi wisata yang lebih ramah lingkungan, menarik, dan menguntungkan bagi semua pihak.

Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Dewi Sari adalah sebuah kelompok sadar wisata yang berlokasi di Kalurahan Guwosari. Kelompok ini memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengelola beberapa destinasi wisata yang ada di wilayah Kalurahan Guwosari, seperti Goa Selarong yang terletak di Pedukuhan Kembangputihan, Gunung Mijil di Pedukuhan Gandekan, Jati Larang di Pedukuhan Iroyudan, Tomat Ireng di Pedukuhan Kadisono, serta Wisata Kuliner Ingkung Ayam Jawa yang ada di Pedukuhan Karangber, Kalakijo, dan Santan. Selain itu, Pokdarwis Dewi Sari juga mengelola Desa Wisata Santan yang semakin dikenal oleh wisatawan.

Semangat masyarakat dalam mengelola pariwisata di Kalurahan Guwosari didasari oleh semangat gotong royong untuk memajukan desa melalui pembangunan Desa Wisata. Pengurus Pokdarwis merangkul para pemuda desa untuk secara mandiri memproduksi berbagai media promosi, seperti video profil desa dan papan penunjuk arah menuju destinasi wisata. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah akses bagi wisatawan yang ingin mengunjungi tempat-tempat wisata di desa tersebut, sekaligus mengenalkan potensi wisata yang ada.

Tujuan utama pembentukan Pokdarwis adalah untuk mengembangkan kelompok masyarakat yang berperan aktif sebagai motivator, penggerak, serta komunikator dalam meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat

sekitar destinasi wisata. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik dalam menyambut para wisatawan, serta memiliki kesadaran yang tinggi terhadap peluang dan nilai manfaat yang dapat diperoleh dari sektor pariwisata. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktif dalam mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewi Sari berada di tengah-tengah masyarakat desa yang memiliki potensi wisata, dan berfungsi sebagai wadah yang menyatukan kepentingan berbagai pihak untuk memajukan sektor pariwisata di daerah tersebut. Sebagai lembaga yang berbasis masyarakat, Pokdarwis berperan penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pariwisata yang berkelanjutan, serta mendorong pengelolaan destinasi wisata yang ramah wisatawan dan menguntungkan masyarakat lokal.

Secara umum, fungsi Pokdarwis dalam kegiatan pariwisata dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai penggerak sadar wisata dan penerapan saptapresona di lingkungan wilayah destinasi wisata. Pokdarwis berperan sebagai penggerak utama untuk menciptakan kesadaran wisata di kalangan masyarakat, serta memastikan penerapan prinsip-prinsip saptapresona seperti keamanan, kenyamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, keramahan, dan kesejahteraan.

2. Sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan kesadaran wisata di daerah tersebut. Pokdarwis berperan sebagai kolaborator yang mendukung program-program pemerintah untuk pengembangan pariwisata, baik dari segi infrastruktur, promosi, maupun pelatihan kepada masyarakat.

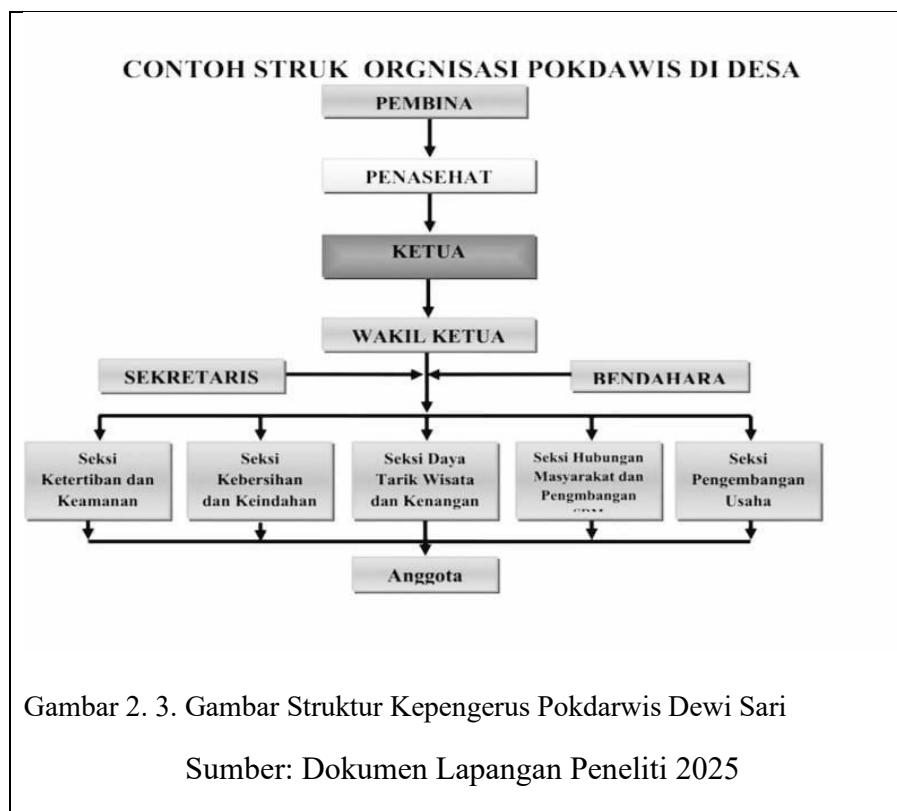
Dengan adanya Pokdarwis Dewi Sari, diharapkan seluruh potensi wisata yang ada di Kalurahan Guwosari dapat berkembang dengan baik, membawa manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat, dan meningkatkan kualitas pariwisata yang berkelanjutan.

a. Keanggotaan Pokdarwis Dewi Sari

- 1) Bersifat sukarela.
- 2) Memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan.
- 3) Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi daya tarik wisata dan memiliki kepedulian terhadap pariwisata.
- 4) Mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan, baik langsung maupun tidak langsung.
- 5) Jumlah anggota setiap Pokdarwis minimal 15 orang.

b. Kepengurus Pokdarwis Dewi Sari

Berikut adalah struktur organisasi Pokdarwis berdasarkan buku pedoman Pokdarwis.



Berdasarkan struktur organisasi Kelompok Sadar Wisata diatas, kepengurusan Pokdarwis terdiri dari:

1. Pembina (Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dan Camat setempat).
2. Penasehat (Kepala Desa setempat).
3. Pimpinan. Unsur pimpinan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
4. Anggota. Terdiri dari anggota masyarakat yang berada/ tinggal di sekitar lokasi daya tarik wisata yang dengan sukarela menyatakan diri sebagai anggota.

5. Seksi-seksi. Masing-masing seksi Pokdarwis terdiri dari seorang penanggungjawab/ koordinator dengan dibantu oleh beberapa anggota Pokdarwis lainnya. Seksi-seksi yang dapat dibentuk meliputi:
 - 1) Keamanan dan Ketertiban: Merupakan seksi yang bertanggungjawab bagi terciptanya kondisi yang aman dan tertib di sekitar lokasi daya tarik wisata/ destinasi pariwisata.
 - 2) Kebersihan dan Keindahan: Merupakan seksi yang bertanggungjawab bagi terciptanya kondisi yang bersih dan indah di sekitar lokasi daya tarik wisata/ destinasi pariwisata.
 - 3) Daya Tarik Wisata dan Kenangan: Merupakan seksi yang bertanggungjawab untuk mengembangkan berbagai potensi sumber daya wisata dan kekhasan/ keunikan lokal sebagai daya tarik dan unsur kenangan setempat.
 - 4) Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Merupakan seksi yang bertanggungjawab untuk menyebarluaskan berbagai informasi terkait dengan potensi kepariwisataan lokal, serta kegiatan Pokdarwis dan mengembangkan kualitas anggota-anggota Pokdarwis.
 - 5) Pengembangan Usaha: Merupakan seksi yang bertanggungjawab untuk menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait dalam pengembangan usaha Pokdarwis.

- 6) Seksi penghijauan: Merupakan seksi yang bertanggungjawab melakukan penghijauan dan perawatan tanaman penghijauan, memastikannya tumbuh dan berkembang dengan baik.
- 7) Seksi perawatan situs Purbakala: Merupakan seksi yang bertanggungjawab melakukan pendataan dan perawatan situs purbakala yang ada, menjaga dari kemungkinan kerusakan dan bahaya pencurian.
- 8) Seksi pelestarian satwa dan tumbuhan: Merupakan seksi yang bertanggungjawab melakukan pendataan terhadap satwa dan tumbuhan yang dilindungi, menjaga dari kemungkinan kepunahan dan bahaya pencurian.

BAB III

RELASI PEMERINTAH KALURAHAN GUOSARI DENGAN KELOMPOK SADAR WISATA DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA

A. Relasi Hegemonik

Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pada masa sebelum pengalihan pengelolaan Obyek Wisata Goa Selarong kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bantul, terdapat relasi hegemonik yang cukup jelas antara Pemerintah Kalurahan Guwosari dan Pokdarwis Dewi Sari dalam pengelolaan objek wisata tersebut. Pemerintah kalurahan, sebagai pemangku kebijakan tingkat lokal, memegang kontrol utama dalam menentukan arah pengelolaan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek wisata tersebut. Sementara itu, Pokdarwis Dewi Sari yang bertugas untuk mengelola secara langsung kegiatan operasional wisata, berada dalam posisi yang lebih subordinat meskipun mereka terlibat aktif dalam aktivitas sehari-hari.

Pemerintah Kalurahan Guwosari memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan yang strategis, yang mencakup perencanaan pengembangan, pemilihan kebijakan, serta pengalokasian sumber daya untuk pengelolaan wisata. Dalam banyak kasus, keputusan yang diambil oleh pemerintah kalurahan sering kali mengarah pada pengaturan yang lebih berfokus pada kepentingan politik dan administrasi kalurahan, sementara masukan atau usulan dari Pokdarwis tidak selalu dipertimbangkan secara maksimal. Ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan di mana pemerintah kalurahan lebih memiliki kontrol terhadap jalannya pengelolaan, meskipun Pokdarwis turut terlibat dalam operasional sehari-hari.

"Pokdarwis memang memiliki peran, tetapi sering kali keputusan-keputusan penting yang menyangkut pengelolaan Goa Selarong lebih banyak datang dari pemerintah kalurahan. Kami sebagai Pokdarwis hanya melaksanakan apa yang sudah diputuskan tanpa banyak diberikan ruang untuk berperan dalam hal-hal yang lebih strategis," ungkap salah satu pengurus Pokdarwis Dewi Sari. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka yang terjun langsung di lapangan, mereka tetap berada di bawah kendali dan arahan pemerintah kalurahan dalam pengelolaan wisata.

Relasi hegemonik ini juga tercermin dalam cara pemerintah kalurahan mengelola hubungan dengan masyarakat sekitar Goa Selarong. Sebagai entitas yang berkuasa, pemerintah kalurahan cenderung memiliki posisi lebih kuat dalam menentukan kebijakan yang berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat. Meskipun masyarakat memiliki peran dalam menjaga kelestarian wisata dan terlibat dalam kegiatan rutin seperti gotong-royong, mereka tidak selalu terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, meskipun masyarakat memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan objek wisata, mereka sering kali tidak memiliki kontrol yang setara dengan pemerintah kalurahan dan Pokdarwis. Hasil observasi di atas, dibuktikan dengan hasil wawancara berikut:



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL

NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN

**LOKASI GOA SELARONG
DI PADUKUHAN KEMBANGPUTIHAN, KALURAHAN
GUWOSARI, KAPANEWON PAJANGAN,
KABUPATEN BANTUL**

**SEBAGAI
SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN**

Dokumen Nomor : 18/TACB-BANTUL/IX/2022
Tanggal : 21 Agustus 2022

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan ditemukan bahwa relasi hegemoni Pemerintah Kalurahan Guwosari dan Kelompok Sadar Wisata Dewei Sari dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini.

Hasil wawancara dengan Lurah Kalurahan Guwosari yakni bapak Masduki Rahmad, S.I.P. usia 33 tahun sebagai berikut:

"Sejak pengalihan pengelolaan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bantul, kami di desa tidak lagi memiliki kontrol langsung atas pengelolaan Goa Selarong seperti dulu. Sebelumnya, kami sebagai pemerintah desa merasa lebih dominan dalam mengambil keputusan bersama Pokdarwis mengenai pengelolaan wisata ini,"
(Wawancara 14 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Guwosari dapat bahwa pengalihan pengelolaan Goa Selarong kepada Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Bantul telah mengurangi kontrol langsung pemerintah desa terhadap pengelolaan objek wisata tersebut. Sebelumnya, pemerintah desa memiliki peran yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan bersama dengan Pokdarwis. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran kewenangan dalam pengelolaan wisata, yang kini lebih terpusat pada pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pernyataan yang sama juga juga disampaikan oleh Ulu-ulu Kalurahan Guwosari yakni bapak Umarwanto, uisa 42 tahun sebagai berikut:

"Sekarang, Dinas Pariwisata yang lebih menentukan arah kebijakan dan pengelolaan wisata ini. Kami lebih banyak sebagai pihak yang memberikan dukungan administratif atau logistik, tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan yang lebih strategis, Kami tidak lagi berada dalam posisi yang menonjol seperti sebelumnya, dan tidak ada lagi perasaan bahwa kami memegang kendali penuh atas segala keputusan. Pokdarwis juga tidak lagi terikat pada pemerintahan desa, tetapi lebih pada keputusan dari dinas," (**Wawancara 24 Januari 2025**)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ulu-ulu guwosari dapat disimpulkan bahwa bahwa peran pemerintah desa dalam pengelolaan wisata Goa Selarong telah berkurang sejak pengalihan pengelolaan kepada Dinas Pariwisata. Pemerintah desa kini lebih berfokus pada dukungan administratif dan logistik, tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan strategis. Pokdarwis juga tidak lagi terikat pada pemerintahan desa, melainkan mengikuti keputusan yang diambil oleh Dinas Pariwisata, yang kini lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan dan pengelolaan wisata tersebut

Sedangkan dari pihak Kelompoka Sadar Wisata Dewi Sari juga memberikan tanggapanaya terkait pengelolaan Obyek wisata Goa Selarong sebagai berikut:

Bapak Darmanto Selaku Ketua Pokdarwis Dewi Sari, usia 50 tahun mengatakan bahwa.

“Dulu, sebelum Goa Selarong di ambil alih oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul kami di Pokdarwis memang terlibat langsung dalam operasional sehari-hari di Goa Selarong, seperti menjaga kebersihan, menyambut wisatawan, dan kegiatan lainnya. Namun, keputusan-keputusan besar terkait pengelolaan, seperti pengembangan atau kebijakan baru, hampir selalu datang dari pemerintah Kalurahan. Kami sering kali tidak diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam diskusi tersebut, Pemerintah Kalurhan yang memiliki kendali penuh atas arah kebijakan, sementara kami hanya ikut mengikuti tanpa banyak diberi ruang untuk berperan dalam merencanakan pengelolaan wisata jangka panjang,” (**Wawancara 13 Februari 2025**)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengurus Pokdarwis Dewi Sari dapat disimpulkan bahwa sebelum pengalihan pengelolaan Goa Selarong kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul, Pokdarwis terlibat langsung dalam operasional sehari-hari seperti menjaga kebersihan dan menyambut wisatawan. Namun, keputusan-keputusan besar terkait pengelolaan, seperti pengembangan dan kebijakan baru, lebih banyak ditentukan oleh pemerintah Kalurahan. Pokdarwis merasa kurang diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tersebut dan sering kali hanya mengikuti keputusan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kalurahan tanpa peran yang signifikan dalam merencanakan pengelolaan wisata jangka panjang.

Sementara itu dari pihak Bamuskal Kalurahan Guwosari yakni bapak Muhammin, A.Th.I usia 41 tahun sebagai ketua Bamuskal juga mengatakan pendapatnya sebagai berikut:

"Meskipun kami berkoordinasi dengan Pokdarwis dalam pengelolaan sehari-hari, keputusan penting seperti pengalokasian anggaran dan pembangunan infrastruktur lebih banyak ditentukan oleh pemerintah kalurahan. Kami yang menentukan prioritas, dan Pokdarwis hanya diminta untuk menjalankan apa yang sudah diputuskan." **(wawancara Februari 2025)**

Berdasarkan hasil wawancara ketua Bamuskal , dapat disimpulkan bahwa meskipun ada koordinasi antara Pemerintah Kalurahan Guwosari dan Kelompok Sadar Wisata Dewi Sari (Pokdarwis) dalam pengelolaan sehari-hari, keputusan-keputusan penting terkait pengalokasian anggaran dan pembangunan infrastruktur lebih banyak ditentukan oleh pemerintah kalurahan. Pemerintah kalurahan memegang kendali utama dalam menentukan prioritas pengembangan wisata, sementara Pokdarwis hanya diminta untuk menjalankan kebijakan yang sudah diputuskan, tanpa banyak kesempatan untuk terlibat dalam perencanaan atau pengambilan keputusan strategis. Hal ini mencerminkan adanya hubungan yang bersifat hegemonik, dengan pemerintah kalurahan memegang dominasi dalam pengelolaan objek wisata.

Sementara itu bapak Nur Kholis, S.Sos.I usia 41 tahun sebagai sekretaris Bamuskal juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Kami sebagai pemerintah kalurahan memang memiliki kewenangan dalam menentukan arah pengembangan objek wisata. Pokdarwis sering kali hanya berperan dalam hal operasional sehari-hari, seperti mengatur pemandu wisata dan fasilitas, namun dalam hal kebijakan besar dan anggaran, kami yang lebih banyak menentukan." **(wawancara 3 Februari 2024)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Bamuskal , dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kalurahan Guwosari memiliki kewenangan penuh dalam menentukan arah pengembangan objek wisata, sementara

Kelompok Sadar Wisata Dewi Sari (Pokdarwis) lebih berperan dalam aspek operasional sehari-hari, seperti mengatur pemandu wisata dan fasilitas. Namun, dalam hal kebijakan besar dan pengalokasian anggaran, pemerintah kalurahan yang lebih dominan dalam mengambil keputusan, sehingga Pokdarwis sering kali hanya mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan tanpa terlibat dalam perencanaan atau pengambilan keputusan strategis. Hal ini menunjukkan adanya relasi hegemonik antara kedua pihak dalam pengelolaan objek wisata Goa Selarong.

Sementara itu hasil wawancara dengan beberapa pengurus Kelompok Sadar Wisata Dewi Sari juga mengatakan hal yang sama terkait relasi antara pemerintah kalurahan guwosari dan Pokdarwis Dewi sari dalam pengelolaan obyek wisata goa selarong. Berikut adalah hasil wawancara dengan bapak Suradi usia 56 tahun sebagai berikut:

"Pemerintah Kalurahan memegang kendali utama dalam merumuskan kebijakan, dan kami di Pokdarwis sering kali hanya menjalankan apa yang sudah ditentukan tanpa banyak bisa mengusulkan perubahan atau ide baru." (**wawancara 22 Januari 2025**)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa relasi antara Pemerintah Kalurahan Guwosari dan Kelompok Sadar Wisata Dewi Sari cenderung bersifat hegemonik, di mana Pemerintah Kalurahan memegang kendali utama dalam merumuskan kebijakan dan keputusan strategis terkait pengelolaan objek wisata Goa Selarong. Kelompok Sadar Wisata Dewi Sari, meskipun berperan aktif dalam operasional sehari-hari, sering kali hanya menjalankan kebijakan yang sudah ditentukan tanpa memiliki ruang yang cukup untuk mengusulkan perubahan atau ide baru. Hal ini menunjukkan

adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara kedua pihak, dengan Pemerintah Kalurahan lebih dominan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pengelolaan wisata

Sementara itu, ibu Ratih usia 45 tahun sebagai salah satu pengurus Pokdarwis Dewi Sari juga mengatkan sebagai berikut:

"Kami merasa sering kali keputusan tentang anggaran dan pengembangan destinasi datang dari pihak pemerintah kalurahan tanpa adanya diskusi lebih mendalam dengan kami yang sehari-hari berhadapan langsung dengan pengunjung." **(wawancara 22 Januari 2025)**

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Kelompok Sadar Wisata Dewi Sari merasa tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran dan pengembangan destinasi wisata Goa Selarong. Meskipun mereka memiliki peran langsung dalam pengelolaan sehari-hari dan interaksi dengan pengunjung, keputusan-keputusan penting sering kali datang dari Pemerintah Kalurahan tanpa adanya diskusi atau konsultasi lebih mendalam dengan mereka. Hal ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam relasi antara pemerintah dan Pokdarwis, di mana pihak pemerintah lebih dominan dalam menentukan arah pengelolaan wisata.

Sedangkan bapak Jiyo usia 51 tahun sebagai salah satu Pengurus Pokdarwis Dewi Sari juga menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

"Kami tahu bahwa ada anggaran untuk pengembangan objek wisata, namun kami tidak dilibatkan dalam perencanaan proyek tersebut. Semua keputusan seolah sudah ditentukan dan kami hanya diminta untuk menjalankan apa yang ada." **(wawancara tanggal 4 Februari 2025)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jiyo, dapat disimpulkan bahwa Kelompok Sadar Wisata Dewi Sari merasa terpinggirkan dalam proses perencanaan pengembangan objek wisata Goa Selarong. Meskipun mereka mengetahui adanya anggaran untuk pengembangan, mereka tidak dilibatkan dalam perencanaan proyek tersebut. Semua keputusan terkait pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata cenderung sudah ditentukan oleh Pemerintah Kalurahan, sehingga mereka hanya diminta untuk menjalankan kebijakan yang telah ada tanpa memiliki kesempatan untuk memberikan masukan atau usulan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang bersifat top-down dan kurangnya partisipasi dari pihak Pokdarwis dalam pengambilan keputusan strategis.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Sebelum pengelolaan Obyek Wisata Goa Selarong diambil alih oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bantul, terjadi relasi hegemonik antara Pemerintah Kalurahan Guwosari dan Pokdarwis Dewi Sari. Pemerintah Kalurahan Guwosari memegang otoritas penuh dalam mengatur dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan Goa Selarong. Dalam hal ini, Pokdarwis Dewi Sari berada pada posisi yang lebih subordinat, hanya menjalankan keputusan dan kebijakan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kalurahan, tanpa memiliki ruang yang cukup untuk terlibat dalam pengambilan keputusan strategis. Relasi ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan, di mana kontrol sepenuhnya berada di tangan pemerintah kalurahan, sementara Pokdarwis hanya melaksanakan kebijakan yang ada.

B. Relasi Egliter

Berdasarkan hasil observasi, Relasi egaliter dalam pengelolaan objek wisata Goa Selarong terjadi ketika kedua pihak, yaitu Pemerintah Kalurahan Guwosari dan Pokdarwis Dewi Sari, memiliki posisi yang setara dalam pengambilan keputusan. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah kalurahan mengundang Pokdarwis untuk berdiskusi dan memberikan masukan terkait pengelolaan wisata, seperti pengembangan fasilitas dan program kegiatan. Meskipun demikian, meskipun ada ruang untuk dialog, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah kalurahan. Meskipun demikian, adanya kesempatan untuk berkolaborasi menunjukkan adanya hubungan yang lebih terbuka dan setara dalam beberapa aspek pengelolaan, meskipun dominasi keputusan tetap ada pada pemerintah kalurahan. Hasil observasi di atas, dibuktikan dengan hasil wawancara berikut

Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Nur Hidaya, S.E sebagai carik kalurahan guwosari sebagai berikut:

"Sebagai Pemerintah Kalurahan, kami memang sering berusaha mengajak Pokdarwis untuk berdiskusi, memberi mereka kesempatan untuk memberikan masukan terkait pengelolaan objek wisata. Kami menghargai pendapat mereka. Namun, pada akhirnya, keputusan-keputusan besar terkait pengelolaan, pembangunan fasilitas, dan arah pengembangan tetap kami yang tentukan. Hal ini lebih karena adanya tanggung jawab kami untuk memastikan kelancaran administrasi dan keberlanjutan desa," ungkap salah satu pejabat pemerintah kalurahan. **(Wawancara 12 Februari 2025)**

Dalam wawancara dengan informan penelitian yakni Bapak Nur Hidayat, S.E usia 35 tahun selaku Carik Pemerintah Kalurahan Guwosari, terungkap bahwa meskipun ada momen-momen relasi egaliter dalam

pengelolaan Goa Selarong, relasi hegemonik lebih mendominasi kebijakan yang ada sebelum pengelolaan objek wisata tersebut diambil alih oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bantul.

Carik Kalurhan Guwosari menjelaskan bahwa pada dasarnya mereka berusaha membangun komunikasi yang terbuka dengan Pokdarwis Dewi Sari, terutama dalam beberapa aspek pengelolaan dan pengembangan wisata. Mereka mengakui bahwa peran Pokdarwis sebagai pengelola operasional sangat penting dan mereka berusaha memberikan ruang untuk berdiskusi dalam beberapa kesempatan. Namun, meskipun demikian, kebijakan besar yang berkaitan dengan pengembangan, alokasi dana, serta perencanaan pengelolaan lebih banyak datang dari keputusan Pemerintah Kalurahan.

Meski demikian, bapak Nur Hidayat, S.E juga menambahkan bahwa dalam beberapa kesempatan, seperti perencanaan kegiatan atau pengembangan jangka panjang, mereka mendengarkan masukan dari Pokdarwis dan berusaha melibatkan mereka. Namun, ruang untuk kolaborasi tersebut tetap terbatas, dan keputusan akhir tetap diambil oleh pemerintah kalurahan, yang dianggap sebagai pihak yang memiliki otoritas penuh.

Sementara itu bapak Umarwanto sebagai ulu-ulu Kalurahan Guwosari menjelaskan sebagai berikut:

"Kami selalu berusaha membangun komunikasi yang terbuka dan setara dengan Pokdarwis. Kami menghargai peran mereka sebagai pelaksana kegiatan wisata dan berusaha untuk melibatkan mereka dalam banyak aspek pengelolaan. Selain itu, kami memang memberi ruang untuk diskusi, tetapi dalam hal kebijakan dan anggaran, kami yang lebih banyak menentukan. Pokdarwis tidak terlibat secara

mendalam dalam penentuan kebijakan besar tersebut." (**wawancara tanggal 24 Januari 2025**)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Pemerintah Kalurahan berusaha membangun komunikasi yang terbuka dan setara dengan Pokdarwis serta memberikan ruang untuk diskusi, dalam kenyataannya, keputusan terkait kebijakan besar dan pengalokasian anggaran lebih banyak ditentukan oleh Pemerintah Kalurahan. Pokdarwis, meskipun dihargai perannya sebagai pelaksana kegiatan wisata, tidak terlibat secara mendalam dalam penentuan kebijakan strategis, yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam pengelolaan objek wisata

Sementara itu Bapak Nur Kholis, S.Sis. I usia 41 tahun sebagai Sekretaris Bamuskal Kalurahan Guwosari sebagai Berikut:

Berikut adalah hasil wawancara dengan bapak Nur Kholis, S.Sis.I sebagai berikut:

"Meski demikian, kami juga mengakui bahwa suara Pokdarwis perlu lebih didengarkan. Kami berusaha untuk memperbaiki itu, agar tidak hanya menjadi satu arah, namun tetap ada batasan dalam pengambilan keputusan yang lebih besar karena keterbatasan kami dalam hal kebijakan dan anggaran," (**Wawancara 12 Februari 2025**)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Nur Kholis, S.Sis.I di atas, menggambarkan adanya relasi egaliter yang terjadi dalam skala terbatas, namun tetap didominasi oleh relasi hegemonik. Pemerintah Kalurahan tetap memegang kontrol penuh terhadap kebijakan strategis, sementara Pokdarwis Dewi Sari berperan lebih pada pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada usaha untuk menciptakan hubungan yang lebih setara, kekuasaan dalam pengelolaan tetap terpusat pada

pemerintah kalurahan, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan antara kedua pihak.

Sembari itu, dari pihak Bamuskal juga menatakan hal yang sama terkait relasi egaliter antara pemerintah kalurahan guwosari dan Pokdarwis Dewi Sari dalam pengembangan obyek wisata Goa Selarong sebagai berikut:

Berikut adalah hasil wawancara dengan bapak Muhammin S.Th.I sebagai berikut:

"Kami memang berusaha menjaga komunikasi yang baik dan terbuka dengan Pokdarwis, serta melibatkan mereka dalam beberapa aspek pengelolaan. Keputusan-keputusan besar tentang pengembangan dan anggaran kami bahas bersama, tetapi dalam prakteknya, keputusan-keputusan tersebut sering kali lebih banyak ditentukan oleh pihak kalurahan. Pokdarwis lebih banyak menjalankan keputusan yang sudah ada tanpa banyak pengaruh dalam pengambilan keputusan utama." **(wawancara tanggal 4 Februari 2025)**

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada upaya dari Pemerintah Kalurahan untuk menjaga komunikasi yang baik dan melibatkan Pokdarwis dalam beberapa aspek pengelolaan objek wisata, pada kenyataannya, keputusan-keputusan besar mengenai pengembangan dan pengalokasian anggaran lebih banyak ditentukan oleh pihak kalurahan. Pokdarwis, meskipun terlibat dalam diskusi, lebih banyak menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan tanpa memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan utama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menjaga hubungan yang terbuka, relasi yang terjadi lebih dominan bersifat hegemonic

Semetra itu dari pihak Pokdarwis Dewi Sari juga mengatakan pernyataan yang sama terkait relasi mereka dengan pemerintah kalurahan guwosari dalam pengembangan obyek wisata Goa Selarong.

Berikut adalah hasil wawancara dengan bapak Darmanto sebagai berikut

"Kami memang selalu berusaha untuk membangun hubungan yang setara dan saling menghargai dengan Pemerintah Kalurahan. Dalam hal pengelolaan objek wisata, kami mencoba untuk berkolaborasi dan berbagi pendapat dalam setiap keputusan yang diambil, namun pada kenyataannya, meskipun kami dilibatkan dalam beberapa diskusi, keputusan-keputusan besar mengenai pengelolaan, pengalokasian anggaran, dan pengembangan destinasi lebih banyak ditentukan oleh Pemerintah Kalurahan. Kami lebih sering diminta untuk melaksanakan keputusan yang sudah ada tanpa banyak pengaruh dalam proses pengambilan keputusan utama. Kami sebagai Pokdarwis lebih banyak menjalankan peran operasional, seperti mengelola pemandu wisata dan fasilitas yang ada, namun dalam hal kebijakan besar, kami merasa keputusan lebih banyak datang dari Pemerintah Kalurahan." **(wawancara tanggal 13 Februari 2025)**

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa meskipun Kelompok Sadar Wisata Dewi Sari (Pokdarwis) berusaha untuk membangun hubungan yang setara dan saling menghargai dengan Pemerintah Kalurahan, pada kenyataannya, Pokdarwis sering kali tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan besar terkait pengelolaan objek wisata, seperti pengalokasian anggaran dan pengembangan destinasi. Meskipun dilibatkan dalam beberapa diskusi, keputusan-keputusan utama lebih banyak ditentukan oleh Pemerintah Kalurahan, dan Pokdarwis lebih sering diminta untuk melaksanakan kebijakan yang telah ada, tanpa banyak kesempatan untuk memengaruhi kebijakan tersebut. Pokdarwis lebih banyak berperan dalam hal operasional, seperti mengelola pemandu wisata dan

fasilitas, sementara kebijakan strategis lebih dominan berasal dari Pemerintah Kalurahan.

Sedadang ibu Ratih, usia 45 tahun sebagai pengurus Pokdarwis Dewi Sari juga berpendapat sebagai berikut. Berikut adalah hasil wawancara dengan ibu Ratih sebagai salah satu pengurus Pokdarwis Dewi Sari sebagai berikut:

"Relasi antara kami dan Pemerintah Kalurahan memang terkadang terasa egaliter dalam beberapa diskusi, seperti saat perencanaan kegiatan wisata atau program pengembangan. Kami diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, tetapi keputusan-keputusan besar tetap diambil oleh kalurahan. Kami sering merasa bahwa masukan kami tidak sepenuhnya dipertimbangkan dalam kebijakan besar mereka," (**Wawancara 22 Januari 2025**)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ratih usia 45 tahun sebagai salah satu pengurus Pokdarwis Dewi Sari, terungkap bahwa meskipun ada upaya untuk menciptakan relasi yang lebih egaliter dalam pengelolaan Goa Selarong, dominasi relasi hegemonik tetap terasa kuat, khususnya sebelum pengelolaan objek wisata tersebut diambil alih oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bantul.

Ibu Ratih juga menjelaskan bahwa selama ini mereka memang diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dalam beberapa kesempatan diskusi yang diadakan oleh Pemerintah Kalurahan. Namun, meskipun ada momen-momen kolaborasi, keputusan-keputusan strategis yang berkaitan dengan kebijakan dan arah pengelolaan wisata lebih banyak datang dari Pemerintah Kalurahan, sementara Pokdarwis hanya menjalankan apa yang sudah diputuskan.

Selain itu Bapak Jumino usia 55 tahun sebagai pengurus Pokdarwis juga berpendapat sebagai berikut. Berikut adalah hasil wawancara dengan bapak Jumino sebagai salah satu pengurus Pokdarwis Dewi Sari sebagai berikut:

"Pada kenyataannya, kami merasa lebih sering menjadi pihak yang melaksanakan kebijakan, daripada terlibat dalam pembuatannya. Misalnya, meskipun kami memiliki ide untuk meningkatkan fasilitas atau melakukan perubahan tertentu untuk kenyamanan wisatawan, keputusan tersebut tetap datang dari kalurahan, dan kami hanya diminta untuk mengimplementasikan keputusan itu," jelasnya
(Wawancara 22 Januari 2025)

Dari pernyataan bapak Jumino dapat Disimpulkan Bahwa peran penting dalam operasional sehari-hari Pokdarwis Dewi Sari, banyak kebijakan strategis yang diambil tanpa melibatkan mereka secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh, meskipun Pokdarwis memiliki beberapa ide mengenai perbaikan fasilitas atau pengembangan wisata yang dapat meningkatkan kualitas layanan dan daya tarik wisata, keputusan mengenai hal tersebut lebih banyak datang dari pihak kalurahan.

Hal ini mencerminkan bahwa meskipun ada beberapa upaya untuk menciptakan ruang partisipatif, pengaruh dominan tetap ada pada Pemerintah Kalurahan Guwosari. Dengan demikian, relasi yang seharusnya lebih setara atau egaliter dalam pengelolaan objek wisata Goa Selarong tetap terhalang oleh dominasi kebijakan dari kalurahan yang lebih berfokus pada administrasi dan kepentingan politik desa.

Selain itu Bapak Suradi usia 56 tahun sebagai salah satu pengurus Pokdarwis Dewi Sari yang menjaga parker wisata Goa selarong juga

berpendapat sebagai berikut. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Suradi sebagai salah satu pengurus Pokdarwis Dewi Sari sebagai berikut:

"Dalam beberapa kesempatan, kami merasa dihargai dengan dilibatkan dalam diskusi. Namun, kami juga menyadari bahwa keputusan final tetap berada di tangan kalurahan, dan kami hanya diminta untuk menjalankan kebijakan yang ada. Kami berharap ke depan ada lebih banyak ruang bagi kami untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan,"(**Wawancara 22 Januari 2025**)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suradi menunjukkan bahwa meskipun dalam beberapa kesempatan Pokdarwis merasa dihargai dan dilibatkan dalam diskusi terkait pengelolaan wisata, mereka menyadari bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pihak Kalurahan. Pokdarwis merasa hanya diberi peran dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, tanpa memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, mereka berharap di masa depan ada lebih banyak ruang bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengelolaan wisata dan pengembangan objek wisata Goa Selarong secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan

Dengan demikian, secara keseluruhan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk menciptakan relasi yang lebih egaliter antara Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis, kenyataannya, relasi hegemonik yang didominasi oleh Pemerintah Kalurahan tetap mendominasi proses pengelolaan Goa Selarong. Dominasi ini tercermin dalam bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada lebih banyak berasal dari pihak Kalurahan, sementara peran Pokdarwis, meskipun ada partisipasi

dalam beberapa diskusi, lebih terbatas pada pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Hal ini mempengaruhi dinamika pengambilan keputusan terkait pengelolaan wisata, di mana Pokdarwis merasa kurang memiliki ruang untuk berperan aktif dalam merancang dan merencanakan langkah-langkah strategis jangka panjang untuk pengembangan wisata. Dalam konteks ini, meskipun ada upaya untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan yang lebih besar dari pihak Pokdarwis, sistem pengelolaan yang ada tetap memperlihatkan ketidakseimbangan kekuasaan yang memberi prioritas pada keputusan pemerintah Kalurahan, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan Goa Selaron

C. Relasi Konflikual

Berdasarkan hasil observasi, Relasi konflikual dalam pengelolaan objek wisata Goa Selarong muncul ketika terdapat perbedaan pandangan atau ketegangan antara Pemerintah Kalurahan Guwosari dan Pokdarwis Dewi Sari. Ketegangan ini seringkali berkaitan dengan prioritas anggaran dan pengalokasian sumber daya, di mana pemerintah kalurahan lebih fokus pada kepentingan administrasi dan politik desa, sementara Pokdarwis yang terlibat langsung di lapangan merasa bahwa kebutuhan operasional dan perbaikan fasilitas lebih mendesak. Perbedaan ini menciptakan ketegangan, karena kedua belah pihak merasa kepentingannya kurang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Hasil observasi di atas, dibuktikan dengan hasil wawancara berikut

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammin, S.Th.I., M.H usia 41 tahun Bamuskal (Badan Permusyawaratan Kalurahan) Guwosari, terungkap bahwa meskipun tujuan utama pengelolaan Goa Selarong adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terdapat ketegangan yang muncul antara Pemerintah Kalurahan Guwosari dan Pokdarwis Dewi Sari. Ketegangan ini berkaitan dengan perbedaan pandangan dalam hal pengalokasian anggaran dan kebijakan pengelolaan. Bamuskal menjelaskan bahwa sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi kebijakan di tingkat kalurahan, mereka sering kali merasa bahwa prioritas yang diusulkan oleh Pokdarwis tidak selalu sesuai dengan kepentingan administrasi desa. Hasil observasi di atas, dibuktikan dengan hasil wawancara berikut

“Memang ada perbedaan pandangan antara kami dan Pokdarwis dalam hal prioritas pembangunan. Kami di kalurahan lebih fokus pada aspek administrasi dan kebijakan desa, sementara Pokdarwis lebih memikirkan hal-hal yang bersifat teknis di lapangan. Namun, pada akhirnya, keputusan-keputusan besar tetap berada di tangan kami,” ujar Bamuskal. (**Wawancara 04 Februari 2025**)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan antara Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis mengenai prioritas Pembangunan dengan Pemerintah Kalurahan lebih fokus pada aspek administrasi dan kebijakan desa, sementara Pokdarwis lebih memikirkan hal-hal teknis di lapangan keputusan-keputusan besar terkait pengelolaan objek wisata tetap berada di tangan Pemerintah Kalurahan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada diskusi mengenai prioritas pembangunan, Pemerintah Kalurahan tetap memegang kendali utama dalam pengambilan keputusan strategis.

Sementara itu, dalam wawancara dengan Lurah Kalurhan Guwosari Bapak Masduki Rahmad, S.IP. mengungkapkan bahwa meskipun hubungan dengan Pokdarwis cukup baik, ketegangan sering muncul terkait pengelolaan anggaran dan program-program yang diusulkan oleh Pokdarwis. Pemerintah kalurahan merasa bahwa beberapa usulan dari Pokdarwis belum cukup mendalam atau terstruktur dengan baik, sehingga kebijakan yang diambil lebih mengarah pada kepentingan administratif desa.

Berikut adalah hasil wawancara dengan bapak Maduki Rahmad, S. IP selaku Lurah Kalurahan Guwosari sebagai berikut:

“Sebagai pemerintah kalurahan, kami bertanggung jawab pada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya fokus pada sektor pariwisata. Sering kali kami harus membuat keputusan yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pokdarwis memang terlibat langsung di lapangan, namun kadang kebijakan yang mereka ajukan belum sepenuhnya selaras dengan kepentingan desa secara lebih luas,” ungkap pejabat kalurahan.
(Wawancara 14 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kalurahan memandang tanggung jawab mereka lebih luas, mencakup kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sektor pariwisata. Meskipun Pokdarwis terlibat langsung dalam pengelolaan di lapangan, keputusan yang diambil sering kali mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat luas dan terkadang kebijakan yang diajukan oleh Pokdarwis belum sepenuhnya selaras dengan kepentingan desa secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan memegang peran utama dalam mengambil keputusan strategis yang lebih luas, sementara Pokdarwis lebih berfokus pada operasional di lapangan.

Di sisi lain, Bapak Jiyo usia 51 tahun sebagai salah satu anggota Pokdarwis Dewi Sari mengungkapkan rasa frustrasi mereka terkait kebijakan yang diambil oleh pemerintah kalurahan. Menurut mereka, meskipun mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaan objek wisata dan berinteraksi langsung dengan wisatawan, banyak keputusan yang diambil tanpa melibatkan mereka secara maksimal. Pokdarwis merasa bahwa suara mereka sering kali tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang penting, terutama terkait pengalokasian dana dan prioritas pembangunan fasilitas wisata.

Berikut adalah hasil wawancara dengan bapak Jiyo sebagai salah satu anggota Pokdarwis Dewi Sari sebagai berikut:

“Sering kali kami merasa bahwa kebijakan yang diambil lebih mengarah pada kepentingan politik atau administratif desa, bukan pada kebutuhan nyata yang kami temui di lapangan. Misalnya, usulan untuk memperbaiki fasilitas atau menambah program wisata seringkali tidak mendapat perhatian yang cukup. Kami hanya menjadi pelaksana kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah kalurahan,” (**Wawancara 04 Februari 2025**)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Pokdarwis merasa bahwa kebijakan yang diambil sering kali lebih mengarah pada kepentingan politik atau administratif desa, daripada memenuhi kebutuhan nyata yang ada di lapangan. Meskipun mereka mengusulkan perbaikan fasilitas atau penambahan program wisata, usulan tersebut sering kali tidak mendapat perhatian yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa Pokdarwis lebih sering berperan sebagai pelaksana kebijakan yang sudah

ditentukan oleh Pemerintah Kalurahan, tanpa banyak pengaruh dalam penentuan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Secara keseluruhan dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa ketegangan ini juga mencuat dalam hal pengelolaan anggaran. Pemerintah kalurahan sering kali mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan administratif desa, sementara Pokdarwis merasa anggaran yang ada tidak cukup untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas wisata yang mereka kelola. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara kebijakan yang diambil oleh pemerintah kalurahan dan kebutuhan yang dihadapi langsung oleh Pokdarwis.

Meskipun demikian, ketegangan ini tidak pernah berkembang menjadi konflik terbuka yang merusak pengelolaan objek wisata. Pemerintah kalurahan tetap memegang kendali dalam pengambilan keputusan strategis, sementara Pokdarwis terus berperan sebagai pelaksana kebijakan dan pengelola operasional. Namun, adanya ketegangan ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan dalam relasi antara kedua pihak, di mana Pokdarwis merasa kurang diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan yang lebih besar

D. Relasi Konstruktif

Berdasarkan hasil observasi, Relasi konstruktif antara Pemerintah Desa Guwosari, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul, dan Pokdarwis Dewi Sari dalam pengelolaan objek wisata Goa Selarong telah

berkembang menjadi sebuah model kolaborasi yang sangat harmonis dan saling mendukung dalam memajukan sektor pariwisata lokal yang berkelanjutan. Pemerintah Desa Guwosari, sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan wilayah desa, tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator kebijakan tetapi juga sebagai pemimpin yang aktif dalam merancang kebijakan dan strategi pengembangan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal. Sejak awal, Pemerintah Desa berusaha menjalin hubungan yang erat dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah pengembangan pariwisata Goa Selarong dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat sekaligus melestarikan warisan budaya dan alam yang menjadi daya tarik utama objek wisata ini. Kolaborasi ini memungkinkan terciptanya sebuah sinergi yang mendorong masyarakat untuk lebih mengenal potensi lokal mereka, sambil menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul, dengan pengalaman dan kapasitas yang dimilikinya dalam mengelola dan memajukan sektor pariwisata, memberikan dukungan yang sangat krusial berupa bimbingan teknis, pelatihan, serta akses ke berbagai sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik Goa Selarong. Mereka turut membantu dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur wisata yang lebih baik, serta memberikan arahan dalam hal promosi pariwisata, baik melalui pemasaran digital maupun penyelenggaraan event yang dapat meningkatkan visibilitas objek wisata ini. Salah satu hal yang juga menjadi

fokus adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal, di mana mereka memberikan pelatihan kepada masyarakat setempat mengenai pengelolaan wisata yang ramah lingkungan, berorientasi pada pelayanan terbaik, dan berbasis pada prinsip keberlanjutan. Dengan dukungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul, Goa Selarong tidak hanya berkembang sebagai objek wisata yang menarik, tetapi juga sebagai model pariwisata yang mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Di sisi lain, Pokdarwis Dewi Sari, sebagai kelompok sadar wisata yang terdiri dari warga lokal, memainkan peran yang sangat penting dalam mengelola operasional harian Goa Selarong. Mereka bukan hanya sebagai pengelola yang bertugas menyambut pengunjung dan menjaga kebersihan, tetapi juga sebagai penjaga dan pelestari nilai-nilai budaya setempat. Pokdarwis Dewi Sari memiliki peran vital dalam menciptakan pengalaman yang autentik bagi para pengunjung, dengan memberikan informasi tentang sejarah dan budaya Goa Selarong yang kaya. Mereka juga menjaga agar setiap keputusan yang diambil dalam pengelolaan objek wisata tetap berorientasi pada keberlanjutan, baik dari sisi lingkungan maupun budaya. Dengan adanya Pokdarwis, masyarakat setempat merasa memiliki kontrol lebih terhadap objek wisata ini, yang menciptakan rasa tanggung jawab dan kebanggaan yang tinggi terhadap tempat wisata yang mereka kelola.

Sinergi antara Pemerintah Desa Guwosari, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul, dan Pokdarwis Dewi Sari menghasilkan kolaborasi yang saling menguntungkan dan saling mendukung. Setiap pihak

bekerja sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan Goa Selarong sebagai destinasi wisata yang tidak hanya menarik bagi pengunjung, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Kerja sama ini juga memastikan bahwa perkembangan sektor pariwisata tidak mengorbankan kelestarian ekosistem dan budaya lokal, melainkan berperan dalam konservasi dan pelestariannya. Dengan kolaborasi yang erat ini, Goa Selarong berkembang menjadi contoh nyata bagaimana pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dapat menguntungkan semua pihak, serta memperkenalkan destinasi ini ke tingkat yang lebih luas, baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Hasil observasi di atas, dibuktikan dengan hasil wawancara berikut



Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang berasal dari Pemerintah Desa dan Pokdarwis Dewi Sari, terungkap adanya relasi konstruktif yang terbentuk dalam pengelolaan objek wisata Goa Selarong setelah pengambilalihan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Relasi ini

mencerminkan adanya sinergi positif antara pihak-pihak terkait, yang mencakup pemerintah desa, Pokdarwis Dewi Sari, dan Dinas Pariwisata.

Berikut adalah hasil wawancara dengan bapak Umarwanto selaku ulu-ulu Kalurahan Guwosari sebagai berikut:

"Pengelolaan objek wisata ini memang sudah dimulai oleh masyarakat, tetapi terbatas pada kapasitas dan fasilitas yang ada. Setelah pengambilalihan oleh Dinas Pariwisata, kami merasakan adanya perubahan yang signifikan, baik dalam hal pengelolaan yang lebih terstruktur maupun peningkatan fasilitas yang ada," **(wawancara 24 Januari 2024)**

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan objek wisata oleh masyarakat sebelumnya terbatas pada kapasitas dan fasilitas yang ada. Namun, setelah pengambilalihan oleh Dinas Pariwisata, terjadi perubahan signifikan, terutama dalam hal pengelolaan yang lebih terstruktur dan peningkatan fasilitas yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang lebih profesional dan terorganisir memberikan dampak positif terhadap pengembangan objek wisata tersebut

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh bapa Masduku Rahmad, S.I.P sebagai Lurah Kalurahan Guwosari sebagai berikut:

"Dinas Pariwisata memberikan banyak dukungan teknis dalam hal pelatihan dan pengembangan kapasitas. Kami juga tetap berperan dalam menjaga agar pengelolaan ini tetap mengutamakan kesejahteraan masyarakat sekitar dan pelestarian alam," **(Wawancara 14 Februari 2025)**

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata memberikan dukungan teknis yang signifikan, terutama dalam hal pelatihan dan pengembangan kapasitas. Meskipun demikian, pihak terkait tetap berperan penting dalam memastikan bahwa pengelolaan objek wisata

tetap mengutamakan kesejahteraan masyarakat sekitar dan pelestarian alam, menunjukkan adanya keseimbangan antara pengembangan wisata dan tanggung jawab sosial serta lingkungan.

Sementara itu, Ibu Sumiati, usia 50 tahun sebagai salah satu spengurus Pokdarwis Dewi Sari juga mengatakan bahwa:

"Setelah Dinas Pariwisata mengambil alih, kami mendapatkan pelatihan dan fasilitas yang lebih baik. Kami merasa lebih siap dan lebih terorganisir dalam mengelola objek wisata ini, meskipun ada perubahan dalam struktur pengelolaan, kami tetap merasa terlibat dan mendapat dukungan penuh dari Dinas Pariwisata dalam pengelolaan obyek wisata ini". (**Wawancara 30 Januari 2025**)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa setelah Dinas Pariwisata mengambil alih pengelolaan, pihak terkait merasa mendapatkan pelatihan dan fasilitas yang lebih baik, yang membuat mereka merasa lebih siap dan terorganisir dalam mengelola objek wisata. Meskipun terjadi perubahan dalam struktur pengelolaan, mereka tetap merasa terlibat dan mendapat dukungan penuh dari Dinas Pariwisata, yang menunjukkan adanya kerjasama yang baik dalam pengelolaan objek wisata tersebut.

Sementara itu, pernyataan yang sama juga disampaikan oleh bapak Tuci, usia 50 tahun sebagai salah satu anggota Pokdarwis Dewi Sari sebagai berikut:

"Kerja sama antara Pokdarwis dan Dinas Pariwisata sangat baik. Kami merasa diperhatikan dalam setiap keputusan yang diambil, baik dalam hal peningkatan kualitas pelayanan maupun dalam hal pengembangan promosi. Pokdarwis Dewi Sari saat ini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan di Goa Selarong, dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah." (**Wawancara 22 Januari 2025**)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kerja sama antara Pokdarwis dan Dinas Pariwisata berjalan dengan sangat baik. Pokdarwis merasa diperhatikan dalam setiap keputusan yang diambil, baik dalam hal peningkatan kualitas pelayanan maupun pengembangan promosi. Dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah, Pokdarwis Dewi Sari terus berupaya meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan di Goa Selarong, yang menunjukkan adanya kolaborasi yang efektif untuk mengembangkan destinasi wisata tersebut.

Sementara itu bapak Jumino, usia 55 tahun sebagai salah satu anggota Pokdarwis Dewi Sari juga berpendapat sebagai berikutaa:

"Dinas Pariwisata telah membantu kami dalam hal promosi dan pengelolaan yang lebih profesional. Meskipun pengelolaan beralih, kami tetap aktif dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan pelestarian budaya dan lingkungan sekitar. Selain itu,komunikasi yang baik antara desa, Pokdarwis, dan Dinas Pariwisata memastikan pengelolaan Goa Selarong berjalan dengan lancar dan saling menguntungkan bagi semua pihak." **Wawancara 4 Februari 2025**

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa meskipun pengelolaan Goa Selarong beralih ke Dinas Pariwisata, Pokdarwis tetap aktif dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan pelestarian budaya dan lingkungan sekitar. Dinas Pariwisata telah memberikan bantuan dalam hal promosi dan pengelolaan yang lebih profesional. Komunikasi yang baik antara desa, Pokdarwis, dan Dinas Pariwisata memastikan pengelolaan objek wisata berjalan lancar dan saling menguntungkan bagi semua pihak.

Secara keseluruhan dari hasil wawancara dengan sejumlah informan dari Pemerintah Kalurahan Guwosari dan Pokdarwis Dewi Sari, dapat

disimpulkan bahwa setelah pengambilalihan objek wisata Goa Selarong oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul, terbentuk relasi konstruktif yang luar biasa antara berbagai pihak yang terlibat. Proses pengelolaan yang lebih terstruktur dan profesional ini menunjukkan adanya sinergi yang sangat positif antara pemerintah desa, Pokdarwis, dan dinas terkait.

Relasi yang terjalin tidak hanya memperkuat koordinasi, tetapi juga memperluas ruang kolaborasi yang menguntungkan semua pihak. Pemerintah Kalurahan Guwosari tetap terlibat aktif dalam perencanaan dan pengawasan, terutama dalam hal pelestarian budaya dan lingkungan. Sementara itu, Pokdarwis Dewi Sari mendapatkan banyak dukungan dalam pengembangan kapasitas dan pelatihan yang membantu mereka meningkatkan kualitas pelayanan serta mengelola objek wisata dengan lebih baik.

Kolaborasi ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan berpindah ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul, semua pihak bekerja sama untuk menciptakan hasil yang lebih baik, saling mendukung, dan berkelanjutan. Dengan adanya kerja sama yang erat ini, Goa Selarong tidak hanya berkembang sebagai objek wisata yang lebih terorganisir, tetapi juga memastikan bahwa aspek sosial dan budaya tetap terlestarikan. Relasi konstruktif yang dibangun setelah pengambilalihan ini sangat mendukung pengelolaan wisata yang lebih berdaya saing dan berdampak positif bagi masyarakat setempat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis terhadap berbagai perspektif para informan, dapat disimpulkan bahwa proses pengalihan pengelolaan objek wisata Goa Selarong dari pemerintah desa ke Dinas Pariwisata di Kalurahan Guwosari tidak sepenuhnya mengubah pola relasi kekuasaan yang ada. Meskipun secara formal terjadi pergeseran otoritas, namun dalam praktiknya relasi yang terbentuk masih bersifat hegemonik, di mana Dinas Pariwisata tetap menjadi aktor dominan dalam pengambilan keputusan, pengaturan kebijakan, dan distribusi sumber daya terkait pengelolaan wisata.

Hegemoni ini terlihat dari minimnya pelibatan pemerintah desa, Pokdarwis, dan masyarakat lokal dalam proses perencanaan strategis maupun dalam pembagian manfaat ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas wisata. Pemerintah desa dan kelompok masyarakat hanya berperan sebagai pelaksana teknis atau pelengkap administratif, bukan sebagai mitra sejajar dalam pengelolaan.

Dengan demikian, meskipun pengalihan ini secara administratif tampak sebagai upaya profesionalisasi pengelolaan wisata, namun secara substantif belum mencerminkan pola relasi yang partisipatif dan kolaboratif. Ketimpangan peran antar aktor tetap berlangsung, memperlihatkan bahwa dominasi aktor birokrasi tingkat kabupaten masih mengakar kuat dalam sistem pengelolaan wisata daerah.

B. Saran

1. Mendorong Pelibatan Aktif Aktor Lokal dalam Pengambilan Keputusan
Dinas Pariwisata perlu membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pemerintah kalurahan, Pokdarwis, dan masyarakat lokal dalam setiap tahap pengelolaan wisata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pelibatan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi harus didasarkan pada kemitraan yang sejajar agar tercipta tata kelola yang inklusif dan demokratis.
2. Membangun Mekanisme Koordinasi yang Setara dan Berkelanjutan
Pemerintah kabupaten melalui Dinas Pariwisata perlu menginisiasi forum komunikasi rutin antara semua pemangku kepentingan, termasuk kalurahan dan Pokdarwis, untuk menyusun kebijakan bersama. Forum ini penting untuk membangun kepercayaan, memperkuat kolaborasi, serta meminimalisir praktik dominasi sepihak dalam pengelolaan wisata.
3. Reformulasi Sistem Distribusi Manfaat Ekonomi Wisata
Sistem pembagian keuntungan dari aktivitas wisata perlu ditinjau ulang agar lebih adil dan transparan. Pemerintah desa, Pokdarwis, dan warga lokal harus mendapatkan bagian yang proporsional sesuai kontribusinya. Skema ini penting untuk mendorong rasa memiliki dan meningkatkan keberlanjutan pengelolaan wisata berbasis komunitas.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Tingkat Pendidikan :

B. Daftar Pertanyaan

a. Relasi Hegemoni

1. Bagaimana Pemerintah Kalurahan Guwosari memastikan kontrol atau pengaruh yang dominan dalam pengelolaan objek wisata?
2. Apakah terdapat kebijakan atau keputusan yang menunjukkan dominasi Pemerintah Kalurahan dalam mengatur pengelolaan objek wisata, meskipun ada masukan dari Kelompok Sadar Wisata?
3. Bagaimana cara Pemerintah Kalurahan Guwosari membatasi atau mengarahkan peran Kelompok Sadar Wisata dalam pengelolaan objek wisata?
4. Apakah ada ketimpangan dalam akses informasi atau sumber daya antara Pemerintah Kalurahan dan Kelompok Sadar Wisata dalam proses pengelolaan objek wisata?
5. Bagaimana Pemerintah Kalurahan Guwosari menggunakan kebijakan atau regulasi untuk mempertahankan posisi dominannya dalam pengelolaan objek wisata?

b. Relasi Egaliter

1. Bagaimana Pemerintah Kalurahan Guwosari dan Kelompok Sadar Wisata membangun komunikasi yang setara dalam perencanaan pengelolaan objek wisata?
2. Sejauh mana keputusan pengelolaan objek wisata dilakukan secara bersama, tanpa ada pihak yang lebih dominan dari yang lainnya?
3. Bagaimana Pemerintah Kalurahan Guwosari memastikan bahwa masukan dari Kelompok Sadar Wisata didengar dan dihargai dalam setiap keputusan yang diambil?
4. Apa langkah-langkah konkret yang diambil oleh kedua belah pihak untuk menjaga hubungan yang setara dalam pengelolaan objek wisata?
5. Bagaimana kedua pihak memastikan bahwa pembagian sumber daya dan manfaat dari objek wisata dilakukan secara adil dan merata?

c. Relasi Konfliktual

1. Apa saja perbedaan pendapat atau kepentingan yang muncul antara Pemerintah Kalurahan Guwosari dan Kelompok Sadar Wisata dalam pengelolaan objek wisata?
2. Bagaimana Pemerintah Kalurahan Guwosari menangani konflik yang muncul dengan Kelompok Sadar Wisata terkait keputusan pengelolaan objek wisata?

3. Apakah ada perasaan ketidakpuasan atau frustrasi dari Kelompok Sadar Wisata terkait kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Kalurahan?
4. Sejauh mana konflik antara Pemerintah Kalurahan dan Kelompok Sadar Wisata memengaruhi efektivitas pengelolaan objek wisata?
5. Apa solusi yang diterapkan untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara Pemerintah Kalurahan Guwosari dan Kelompok Sadar Wisata?

d. Relasi Konstruktif

1. Bagaimana Pemerintah Kalurahan Guwosari dan Kelompok Sadar Wisata berkolaborasi untuk mengembangkan dan meningkatkan daya tarik objek wisata?
2. Apa bentuk kerja sama yang terjalin antara Pemerintah Kalurahan dan Kelompok Sadar Wisata dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan objek wisata?
3. Bagaimana kedua pihak membangun kepercayaan dan saling mendukung dalam pengelolaan dan promosi objek wisata?
4. Apa hasil positif yang telah dicapai melalui kerjasama antara Pemerintah Kalurahan Guwosari dan Kelompok Sadar Wisata dalam pengelolaan objek wisata?
5. Bagaimana Pemerintah Kalurahan dan Kelompok Sadar Wisata merencanakan inovasi atau pengembangan baru untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan objek wisata?

LAMPIRAN



Foto bersama Bapak Masduki Rahmad, S.



Foto Bersama Bapak Umarwanto



Foto Bersama Bapak Darmanto



Foto Bersama Bapak Nur Hidaya, S.E



Foto Bersama ibu Ratih



Foto bersama Bapak Suradi



Foto bersama Bapak Muhamimin, S.Th.I., M.H



Foto bersama Bapak Jiyo



Foto bersama Ibu Sumiati



Foto bersama Bapak Tuci



2025/02/04 12:30

Foto bersama Bapak Jumino

DAFTAR PUSTAKA

- Armela Shintani. (2020). Relasi Pemerintah Daerah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Di Kelurahan Sei Gohong. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 9(2), 28–37. <https://doi.org/10.37304/jispar.v9i2.1517>
- Aziz, Y. M. (2021). Hegemoni Kekuasaan Ustadz Hikmat Arif Terhadap Masyarakat Kampung Dalur Mawar Desa Bojong Pandan Kabupaten Serang: Perspektif Teori Antonio Gramsci. *Jurnal Silatene (Jurnal Sosial Humaniora)*, 1(1), 50–70. <https://jurnalsilatene.org/index.php/jsh/article/view/3>
- Bolu, M. U. (2023). Memanusiakan Sesama Manusia: Sebuah Spiritualitas Laku Beragama yang Egaliter dalam Bingkai Kenosis. *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen*, 5(1), 105–113. [https://doi.org/https://doi.org/10.55884/thron.v5i1.20](https://doi.org/10.55884/thron.v5i1.20)
- Coser, L. A. (1956). *The Functions of Social Conflict*. Free Press. <http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData>.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press.
- Daya Negri Wijaya. (2016). Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan Jhon Locke. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 1(2), 183–193. <http://journal.um.ac.id/index.php/jspih>
- Fadhilah Helmi, P. (2024). Konflik Kepentingan dalam Implementasi Pembangunan Wisata Religi di Desa Bogoran. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 4(2), 179–185. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i2.1178>
- Firmansyah, A. W., & Auliya, N. I. (2022). Hegemoni Penindasan Dan Moral Dalam Novel Bidadari Tak Suci Karya Fissilmi Hamida (Kajian Sosiologi Sastra). *Jurnal Kansasi: Jurnal ...*, 7(2), 59–67. <https://doi.org/10.31932/jpbs.v7i2.1971>.
- Handoko, V. S. (2018). Bingkai Berita Konflik Pengelolaan Objek Wisata Gua Pindul, Gunung Kidul, Yogyakarta. *Forum Ilmu Sosial*, 45(1), 51–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/fis.v44i2.13288>.
- Hermawan, H. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*, 3(2), 105–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.31294/par.v3i2.1383>.
- Hutagalung Daniel. (2004). Hegemoni, Kekuasaan dan Ideologi. *Jurnal Pemikiran Sosial, Politik Dan Hak Asasi Manusia*, 12(12), 1–17. https://d1wqxts1xzle7.cloudfront.net/61510677/Hegemoni_Kekuasaan_dan_Ideologi20191214-90728-6m6xb3-libre.pdf?1576323206=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DHegemoni_Kekuasaan_dan_Ideologi.pdf&Expires=1705557990&Signature=Zr4s-ygsiHu4Ykt3crt
- Imam, T. C. (2017). *Relasi Intraorganisasi Pemerintah Kota Batu Dalam*

- Pengelolaan Sektor Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah* [Universitas Brawijaya Malang]. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/8615>
- Junaidi, M. M. (2021). Hegemoni Kekuasaan Antonio Gramsci Dalam Cerpen “Sharahkh Al-Qubur” Karya Kahlil Gibran. *Jurnal Bahasa Lingua Scientia*, 13(1), 1–25. <https://doi.org/10.21274/ls.2021.13.1.1-25>
- Karl Marx. (1867). *Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie* (F. Engels (ed.); Cetakan Pe). Verlag von Otto Meisner.
- Martha C. Nussbaum. (2011). *Creating Capabilities: The Human Development Approach* (Edisi Pert). Harvard University Press.
- Marx, Karl, Engels, F. (1848). *Manifesto of the Communist Party*. (Cetakan Pe). International Publishers.
- Mills, C. W. (n.d.). *The Power Elite*. Oxford University Press.
- Nurdiansyah Dino Alfian, I. W. (2024). Collaborative Governance Pengembangan Pariwisata di Desa Sidomulyo Kabupaten Jember. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(3), 1–14. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i3.121>
- Purwanti, I. (2019). Strategi Kelompok Sadar Wisata Dalam Penguatan Desa Wisata. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3), 101–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/jisip.v8i3.1792>.
- PUTRI REGITA INDRYANI SITEPU. (2022). *Relasi Pemerintah Desa Dan Kelompok Sadar Wisata Dalam Mengelola Desa Wisata Di Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati*. [Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta]. <http://repo.apmd.ac.id/id/eprint/1794>.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice* (pertama). Harvard University Press.
- Rousseau, J.-J. (1986). *The Social Contract* (Sumardjo (ed.)). Erlangga. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20252442&lokasi.lokal>
- Rousseau, J.-J. (2007). *Du Contrat Social*. Visimedia.
- Safitri, D., Fatimah, S., & Budiawan, R. Y. S. (2024). *HEGEMONI*. 8(2), 14–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/lf.v8i2.22285>
- Simmel, G. (1908). *The Sociology of Conflict*. Free Press.
- Siswadi, G. A. (2024). *Filsafat Manusia: Memahami Manusia Sebagai Homo Complexus*. <https://www.researchgate.net/publication/377951590>
- Siswati, E. (2017). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci. *Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 5(1), 11–33. <https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>.
- Sugiyono, M. (1999). *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Pustaka Pelajar.
- Susi Iswanti, S. I., & Zulkarnaini, Z. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan di Kepenghuluan Rantau Bais

- Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 92–103. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).9307](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9307).
- Vember, R. (2024). *Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Governance Di Kalurahan Jerukwudel Kapanewon Girisubo* [Sekolah Tinggi Pembangunan Mayarakat Desa “APMD” Yogyakarta]. <http://repo.apmd.ac.id/id/eprint/3140>
- Wahyuyusifa, D. M. (2021). *Pengelolaan Objek Wisata Senjoyo di Kabupaten Semarang* [Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/95213>
- Weber, M. (1946). *From Max Weber: Essays in Sociology* (H. H. G. dan C. W. Mills (ed.)). Oxford University Press.
- Wibowo, A., Lestari, E., & Sugihardjo, S. (2020). Model of Conflict Resolution with Social Capital in the Development of Genilangit Tourism Village, Poncol District, Magetan Regency, East Java Province. *Jurnal Penyuluhan*, 16(1), 78–91. <https://doi.org/10.25015/16202028590>.

